

**ANALISIS PERENCANAAN DAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
PADA KANTOR BAPPELITBANGDA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Diajukan Oleh

Desri Pakan

4517011002



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Analisis Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Nama Mahasiswa : Desri Pakan

Stambuk/NIM : 4517011002

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Haeruddin Saleh, SE., MSi

  
Rafiuddin, SE., MSi

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Ekonomi Pembangunan

  
DR.H.A. Rafiuddin Mane SE.,MSi.,SH.,MH

  
Rafiuddin, SE., MSi

Tanggal Pengesahan

## PERNYATAAN KEORSINILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desri Pakan

NIM : 4517011002

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Analisis Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Pada Kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikuti dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 30 Maret 2021



Desri Pakan

**ANALISIS PERENCANAAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA PADA KANTOR BAPPELITBANGDA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Oleh:**

**Desri Pakan**

**Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bosowa**

**ABSTRAK**

**Desri Pakan. 2021.** Analisis Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, (dibimbing oleh **Dr. Haeruiddin Saleh SE.,MSi dan Rafiuddin SE.,MSi**) Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis metode analisis dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Untuk menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan maka digunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Hasil penelitian bahwa kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan belum efektif dan kurang efisien dalam merealisasikan anggaran pendapatan pada tahun 2020 dan anggaran belanja pada tahun 2018-2020 . Hal ini dilihat dari hasil analisis rasio efektivitas anggaran pendapatan sebanyak 67,13% dan rasio efisiensi anggaran belanja tahun 2018 sebanyak 98,27%, anggaran belanja tahun 2019 sebanyak 93,57%, dan 92,76% pada tahun 2020, sehingga kantor Bappelitbangda provinsi sulawesi selatan sebaiknya dalam menyusun dan merealisasikan anggaran perlu memperhitungkan Efisiensi dan Efektivitas atas anggaran yang akan dikelola dan melakukan evaluasi program atau kegiatan yang belum dilakukan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sehingga realisasi bisa tercapai sesuai dengan targetnya.

**Kata Kunci: Perencanaan, Realisasi dan Efektif**

**ANALYSIS OF PLANNING AND REALIZATION OF THE REVENUE AND  
EXPENDITURE BUDGETS AT THE OFFICE OF BAPPELITBANGDA  
OF SOUTH SULAWESI PROVINCE**

**By:**

**Desri Pakan**

**Prodi Development Economics Faculty Of Economics and Business University  
Bosowa**

**ABSTRAK**

**Desri Pakan. 2021.** Analysis of Planning and Realization of the revenue and expenditure budgets at the office of Bappelitbangda of South Sulawesi Province, (supervised by **Dr. Haeruddin Saleh SE., MSi and Rafiuddin SE., MSi**) Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Bosowa.

This study aims to determine the effectiveness and efficiency of planning and realization of revenue and expenditure budgets at the office of Bappelitbangda of South Sulawesi Province. The type of analysis method in this research is descriptive analysis, both qualitative and quantitative, with data collection techniques, namely through observation, interviews, documentation and literature study. To analyze the Effectiveness and Efficiency of Planning and Realization of the Revenue and Expenditure Budget at the Bappelitbangda office of south sulawesi province, the effectiveness ratio and efficiency ratio are used.

The results of the study show that the South Sulawesi Provincial Bappelitbangda office has not been effective and inefficient in realizing the revenue budget in 2020 and the expenditure budget in 2018-2020. This can be seen from the results of the analysis of the effectiveness ratio of the revenue budget as much as 67,13% and the efficiency ratio of the 2018 budget of 98,27%, the 2019 budget of 93,57%, and 92,76% in 2020, so that the provincial Bappelitbangda office south sulawesi should in compiling and realizing the budget must take into account the efficiency and effectiveness of the budget to be managed and evaluate programs or activities that have not been carried out and adjusted to the available budget so that realization can be achieved according to the target.

**Keywords: Planning, Realization and Effective**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. atas segala kasih dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Kantor Bappellitbangda Provinsi Sulawesi Selatan”** sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Bosowa Makassar.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak, sehingga melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat selama proses penulisan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, Alm.Bapak Lapu' Sapare dan Alm.Ibu Yuli Pasassang, yang telah melahirkan, membesarkan, dan kepada saudara(i) saya yang telah memberikan dukungan moral serta memberikan doa secara tulus dan penuh kesabaran kepada penulis, serta menyekolahkan dan membiayai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Bosowa Makassar.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa
2. Bapak Dr.H.A.Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

3. Ibu Dr.HJ.Herminawati Abu Bakar SE,MM Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Kepada Bapak Dr.Haeruddin Saleh SE.,M.Si sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
5. Bapak Rafiuddin SE.,M.Si Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar dan sebagai dosen pembimbing
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bias bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Bapak Ir.A.Darmawan Bintang.MDevPlg selaku kepala kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh staff atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Seluruh teman seperjuangan dan teman mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan maupun dari jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, yang telah mendukung penulis dari awal berkuliah hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan

bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Besar harapan semoga Tuhan mencurahkan berkat, dan kasih karunia-Nya kepada kita semua sehingga apa yang telah dipaparkan penulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 03 April 2021





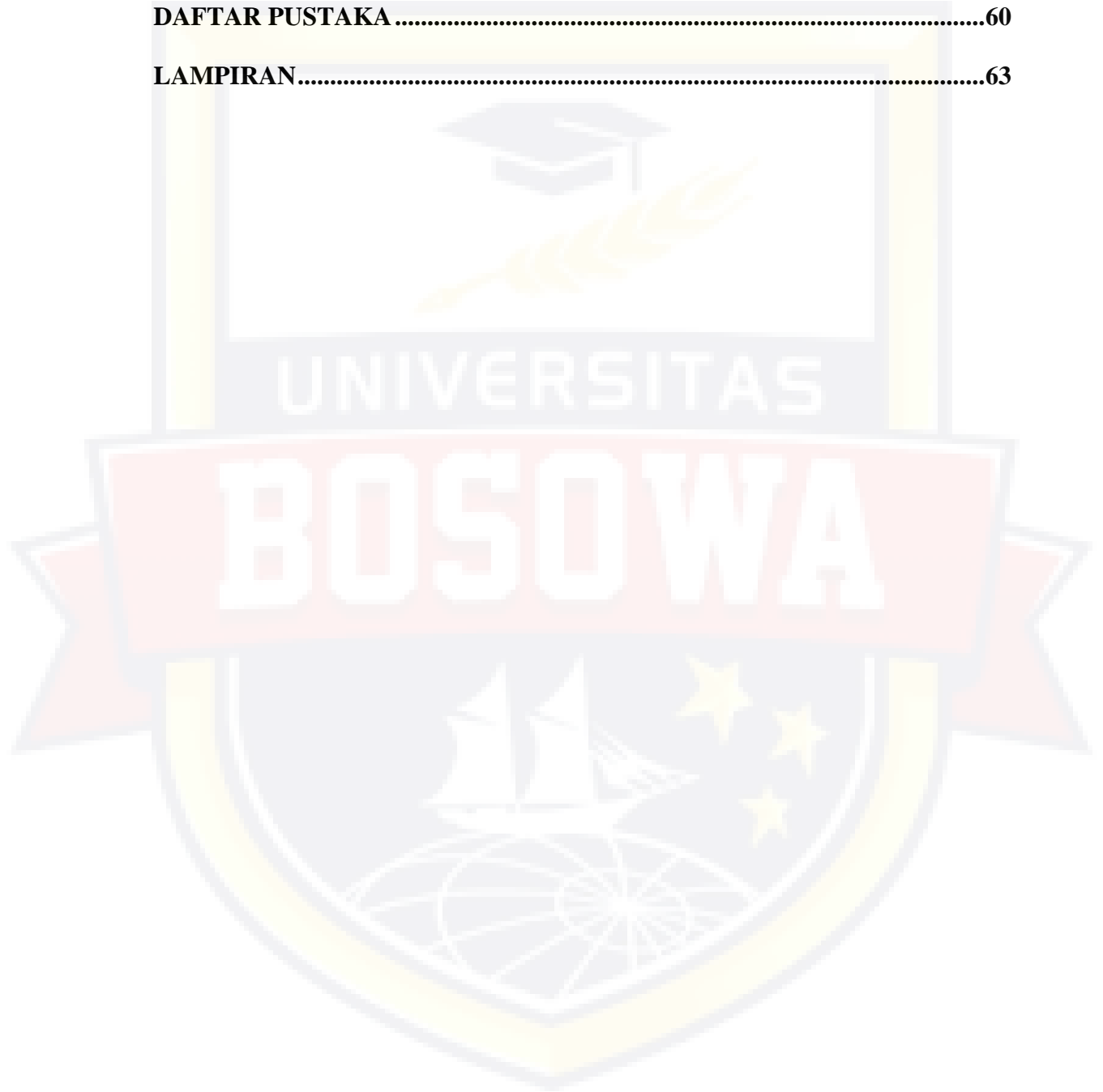
## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEORSINILAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Kerangka Teori.....	9
2.1.1 Pengertian Anggaran.....	9
2.1.2 Tujuan Anggaran.....	10
2.1.3 Fungsi Anggaran dan Karakteristik Anggaran.....	11
2.1.3.1 Fungsi Anggaran .....	11
2.1.3.2 Karakteristik Anggaran .....	12
2.1.4 Revisi Anggaran.....	13

2.1.5	Perencanaan.....	14
2.1.5.1	Pengertian Perencanaan .....	14
2.1.5.2	Aspek Perencanaan .....	16
2.1.5.3	Ruang Lingkup Perencanaan.....	17
2.1.5.4	Jenis Rencana .....	17
2.1.6	Realisasi Anggaran.....	19
2.1.6.1	Pengertian Laporan Realisasi Anggaran .....	19
2.1.6.2	Tujuan dan Manfaat Laporan Realisasi Anggaran.....	20
2.1.7	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	20
2.1.7.1	Pengertian APBD .....	20
2.1.7.2	Asas Umum APBD .....	21
2.1.7.3	Struktur APBD .....	22
2.1.8	Efektifitas .....	22
2.1.9	Efisiensi.....	23
2.2	kerangka Pikir .....	25
2.3	Hipotesis.....	27
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	28
3.2.1	Jenis Data .....	28
3.2.2	Sumber Data Penelitian.....	28
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	29
3.3.1	Penelitian Lapangan ( <i>Field Research</i> ).....	29

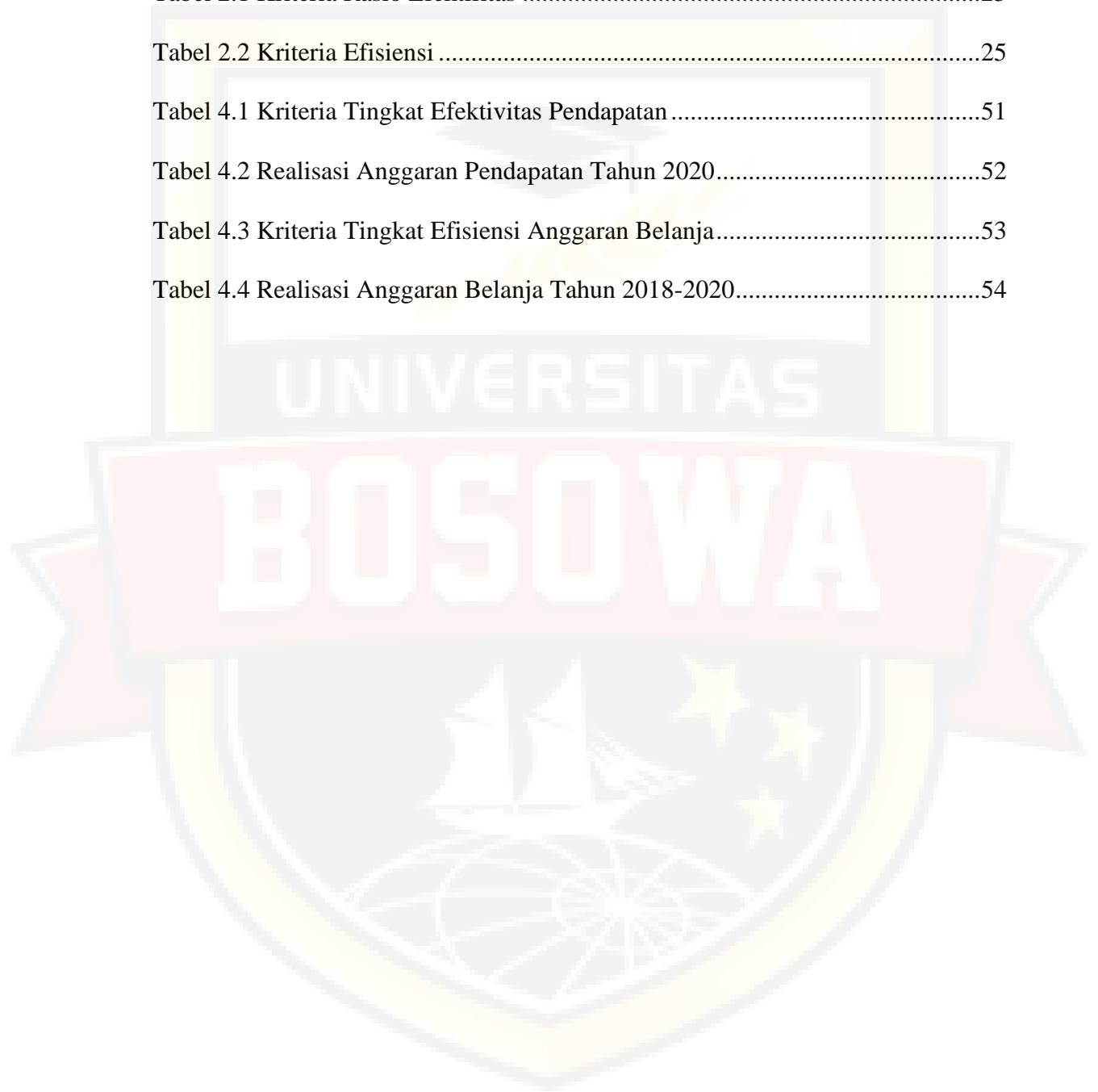
3.3.2 Penelitian Kepustakaan ( <i>Library Research</i> ) .....	30
3.4 Metode Analisis .....	31
3.4.1 Analisis Efektifitas .....	31
3.4.2 Analisis Efisiensi.....	33
3.5 Definisi Operasional.....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Umum Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan .....	36
4.1.1 Gambaran Pelayanan Bappelitbangda Prov.Sulsel .....	36
4.1.2 Visi dan misi Bappelitbangda Prov.Sulsel.....	41
4.1.2.1 Visi Bappelitbangda Prov.Sulsel.....	41
4.1.2.2 Misi Bappelitbangda Prov.Sulsel .....	41
4.1.3 Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Prov.Sulsel.....	41
4.1.3.1 Tugas Bappelitbangda Prov.Sulsel .....	41
4.1.3.2 Fungsi Bappelitbangda Prov.Sulsel .....	42
4.1.4 Struktur Organisasi Bappelitbangda Prov.Sulsel .....	43
4.1.5 Tugas dan Fungsi masing-masing bagian .....	43
4.2 Deskripsi Data.....	48
4.2.1 Perencanaan Anggaran.....	50
4.2.2 Realisasi Anggaran.....	51
4.2.2.1 Rasio Efektivitas .....	51
4.2.2.2 Rasio Efisiensi.....	53
4.3 Analisis Data .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>

5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>



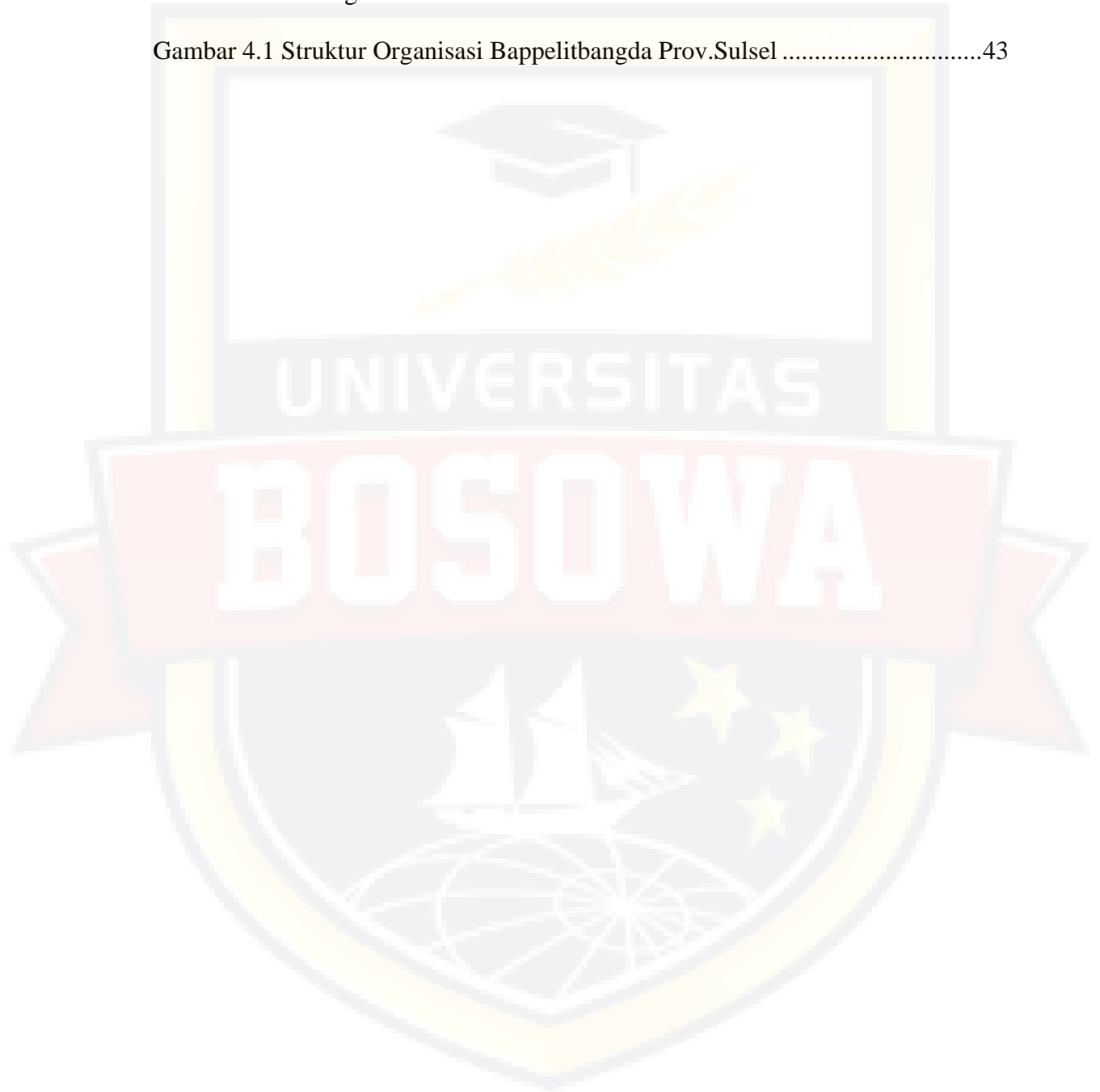
## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Rasio Efektifitas .....	23
Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi .....	25
Tabel 4.1 Kriteria Tingkat Efektivitas Pendapatan .....	51
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2020.....	52
Tabel 4.3 Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja.....	53
Tabel 4.4 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018-2020.....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bappelitbangda Prov.Sulsel .....	43



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi Realisasi anggaran sehingga anggaran yang akan diusulkan lebih banyak daripada yang akan diperlukan di lapangan, sebab anggaran yang direkomendasikan tidak semuanya akan disepakati, dimana pada saat anggaran akan di rekomendasikan tidak memperkirakan apa yang dibutuhkan di lapangan dan keringanan dalam pelaksanaannya. Secara umum sarana yang digunakan sebagai perencanaan untuk mengetahui target yang akan dicapai oleh pemerintah untuk pelaporan semua kegiatan keuangannya adalah anggaran, dan dalam mengetahui jumlah perwujudan mengenai anggaran APBN yang sebelumnya sudah dialokasikan maka diperlukan sebuah laporan.

Anggaran adalah rencana tertulis tentang kegiatan perusahaan maupun instansi yang ditunjukkan secara kualitatif untuk periode tertentu dan pada dasarnya dikemukakan dalam satuan uang dan barang. Anggaran pemerintah yang menggunakan dana dari masyarakat berkaitan dengan cara untuk menentukan jumlah dana yang disepakati untuk setiap aktivitas maupun programnya dalam satuan moneter. Anggaran dalam lingkup pemerintah mencakup semua rencana mengenai jumlah biaya terhadap rencana yang akan dilakukan dan seberapa besar cara yang digunakan untuk memperoleh uang. Dalam ukuran anggaran perusahaan sektor publik, anggaran mencakup berapa biaya rencana dan berapa banyak dana yang akan dikumpulkan untuk membiayai

rencana tersebut. Adapun hasil akhir dalam proses akuntansi dan dirancang sebagai pemberi laporan terkini tentang keadaan keuangan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (termasuk pihak internal dan eksternal) yaitu laporan keuangan. Tujuan dari informasi keuangan adalah supaya memberi informasi tentang kinerja anggaran yang dimiliki.

Anggaran adalah bagian dari metode pengelolaan manajemen yang dapat digunakan dalam proses perencanaan dan pengelolaan, sehingga manajer dapat melakukan dan merealisasikan aktivitas operasional demi mewujudkan efektivitas dan efisiensi. Anggaran skala public melibatkan proses pemakaian dana publik untuk menetapkan jumlah dana yang didistribusikan untuk setiap program yang dirancang dan kegiatan dalam satuan moneter. Hal ini berbeda terhadap anggaran swasta sebab tidak adanya kaitan terhadap manifestasi anggaran publik. Di lingkup pemerintahan, dana untuk organisasi bersumber dari retribusi dan pajak, adapun keuntungan bagi sektor swasta milik daerah atau negara. Kinerja anggaran akan lebih baik apabila penerapan dan pengevaluasiannya berdasarkan pada penyelesaian yang sudah ditetapkan.

Didalam menetapkan pendapatan dan pengeluaran, penerapan dari rancangan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, pengendalian pengeluaran, dasar peningkatan ukuran standar evaluasi dari kinerja, sarana untuk pengkoordinasian pegawai dan sebagai sarana sistem yang mengikat keseluruhan kegiatan dari berbagai satuan kerja, maka digunakan sarana dan instrument berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Perencanaan APBD adalah keseluruhan kegiatan dan tindakan pemerintah memandang perlu adanya



partisipasi aktif yang mewadai berbagai aspirasi dan suara dari masyarakat, sehingga dapat menggambarkan keperluan riil masyarakat, seperti yang telah tertulis di dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang sudah disusun maupun dirangkap.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi rakyat dan untuk mendorong maju perekonomian masing-masing daerah, dan memajukan efisiensi maupun efektivitas dalam penanganan independensi daerah. Belanja juga merupakan keseluruhan dari pengeluaran pemerintah daerah yang akan menurunkan jumlah anggaran yang terkait melebihi periode tahun anggaran yang pembayarannya tidak dapat didapatkan balik bagi pemerintah. Belanja daerah berdasarkan UU No.33 tahun 2004 merupakan keseluruhan dari tanggungjawab daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih untuk periode tahun anggaran yang berkaitan. Belanja daerah merupakan hal yang tercantum di dalam APBD yang ditunjuk sebagai penunjang pengelolaan yang sedang dilakukan oleh pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Bappelitbangda provinsi sulawesi selatan, memiliki tugas pokok untuk mewujudkan dan mengerjakan penyusunan kebijakan daerah dan pelaksanaannya pada bidang perencanaan pembangunan daerah, hal ini dimaksudkan menjadi salah satu lingkup pada kelembagaan teknis daerah dan menjadi bagian dari SKPD. Permendagri No. 56 Tahun 2007 menjelaskan bahwasannya didalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, keuangan daerah ialah hak dan kewajiban tiap-tiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, baik

yang terkait dengan semua rupa kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Laporan Realisasi Anggaran ialah salah satu bagian yang fundamental pada sebuah instansi, yang dimana hal ini berguna dalam pemberian informasi keadaan keuangan sebuah instansi pada saat-saat tertentu.

Manajemen suatu perusahaan atau instansi, baik yang mengarah pada profit atau non profit, selalunya akan diarahkan kepada pengambilan keputusan pada masa yang akan datang. Keputusan yang ditentukan baik atau buruknya bergantung pada informasi yang dipakai sebagai keahlian manajemen untuk menafsirkan atau menginterpretasikannya. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang penting yang bisa dipergunakan oleh manajemen didalam pengambilan kebijakan maupun keputusan. Laporan keuangan yang menerangkan informasi tentunya juga diperlukan setiap pihak yang membutuhkan termasuk pemerintah daerah yang berperan sebagai aparat yang dipercayakan oleh masyarakat dalam pengelolaan keuangan Negara. Oleh karena itu masyarakat yang dijadikan pemangku otoritas tertinggi telah memberikan kepercayaan bagi pemerintah untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar agar dapat mewujudkan *Good Government Governance*, yang digambarkan sesuai dengan keseimbangan terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

Efektivitas dan Efisiensi sangat dibutuhkan dalam penilaian dan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang dipakai yang berkaitan pada hubungan antara target yang ingin dicapai dan target yang sudah terlaksana. Menurut (Mahmudi 2011:22), Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya

yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Sedangkan, efektivitas (hasil guna) ialah dukungan antara pengeluaran dengan tujuan untuk target yang harus dicapai, pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau alokasi kebijakan. Didalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya (APBD) secara efektif dan efisien maka untuk menghadapi tekanan terhadap efisiensi, pihak pemerintah perlu memperkirakan semua biaya baik ekonomi sosial, maupun dampak negatif terhadap aktivitas dan kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan.

Pendirian badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk merancang, menyiapkan, mengatur, mengorganisasikan, mengsinkronisasikan dan membuat evaluasi atas semua program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah. Dalam Keputusan No 27 Tahun 1980 pasal 1 dinyatakan bahwa di Provinsi Daerah Tingkat 1 dibentuk Bappelitbangda provinsi sulawesi selatan Tingkat 1, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 107 keputusan menteri dalam negeri No 185 Tahun 1980 ditegaskan bahwa pembentukan organisasi tata kerja Bappelitbangda tingkat 1 ditetapkan dengan peraturan yang telah berjalan setelah mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut dibentuk Bappelitbangda tingkat 1 Sulawesi Selatan Melalui Perda No. 3 Tahun 1982. Namun seiring dengan pelaksanaan otonomi Daerah, maka Bappelitbangda Sulawesi Selatan mengalami strukturisasi yang dijabarkan dalam perda No. 21 Tahun 2001.

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sesuai peraturan daerah tersebut adalah badan yang bertugas membantu kepala daerah atau Gubernur dalam menjalankan pemerintahan pada lingkup perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, maka Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai beberapa tugas yakni mengatur dan menyusun rencana kegiatan atau program pemerintah daerah seperti kegiatan pembangunan daerah pembangunan tahunan daerah serta rancangan koordinasi sekretaris daerah. Gambaran pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan terhadap keterlibatannya dengan penyusunan rancangan strategis tersebut sangat dibutuhkan didalam mennguraikan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang terkait dengan kelembagaan dari Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan, sumber daya yang dimiliki oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi yang diantaranya adalah keadaan kepegawaian, serta keadaan sarana dan prasarana yang dipunyai, perwujudan kinerja dan manifestasi dari pelayanan yang terkait dengan kewajiban pokok dan tugas Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga tantangan serta peluang dalam usaha peningkatan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Tugas Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu komponen pemerintah daerah yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan dan bertanggungjawab atas perancangan pembangunan daerah. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan ialah salah satu lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

yang kemudian ditindaklanjuti dengan mewujudkan penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang tingkatan, Susunan instansi, tanggungjawab, Tugas dan Fungsi, Serta aturan Kerja bappelitbangda Provinsi sulawesi selatan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat penyusunan laporan akhir dengan judul :

**“Analisis Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan”.**

#### 1.2 Rumusan Masalah

“Apakah Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan sudah efektif dan efisien”

#### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Pada badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) provinsi sulawesi selatan.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) provinsi sulawesi selatan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 2. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan dan pandangan bagi penulis terhadap

Efektifitas dan efisiensi anggaran.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi dan data perbandingan yang setara dengan bidang yang akan diteliti.

### 3. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Digunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada kantor Bappelitbangda provinsi sulawesi selatan, serta merupakan syarat dalam menempuh ujian skripsi di Universitas Bosowa Makassar

- b. Bagi Instansi

Dijadikan sebagai informasi dan referensi untuk memperbaiki performa keuangan serta dijadikan masukan kepada kantor Bappelitbangda provinsi sulawesi selatan.

- c. Bagi Akademis

Bisa dijadikan kajian ilmu sebagai tambahan referensi dalam lingkup pengetahuan khususnya tentang perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada kantor Bappelitbangda provinsi sulawesi selatan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Pengertian Anggaran

Anggaran (*Butgeting*) merupakan alat perencanaan, pedoman, pengendalian, dan alat pengawasan di bidang keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non-laba. Dengan menggunakan anggaran maka perkembangan instansi akan dapat dipelajari dengan teliti dan berkesinambungan. Anggaran dapat berjalan dengan baik apabila dalam organisasi instansi tersebut ada dukungan aktif, baik dari pelaksanaan tingkat atas maupun tingkat bawah. Hal ini menyangkut kepada manusia, khususnya pada pegawai yang ada pada suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk memahami anggaran, maka pada bab ini akan dibahas teori yang berhubungan dengan anggaran.

Menurut Munander (2014:1) Anggaran yaitu; “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang”.

Gunawan Adisaputro (2014:02) mendefinisikan *Budget* adalah; “Suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan koordinasi dan pengawasan”

Deddi Nordiawan, dkk (2013:19) yang dimaksud dengan *Budget* (Anggaran) adalah; “Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan organisasi

sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang terbatas”.

Menurut Nafarin (2013:11), mendefinisikan bahwa; “Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kualitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa secara umum anggaran merupakan suatu bentuk rencana aktivitas suatu kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu periode mendatang yang secara umum dinyatakan secara kualitatif berdasarkan angka-angka yang dibuat dengan pertimbangan yang komprehensif.

#### 2.1.2 Tujuan Anggaran

Pada dasarnya bahwa tujuan pokok anggaran adalah memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta nonfinansial di masa yang akan datang, dan mengembangkan setiap informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran.

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2013:19), antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
- b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- c. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
- d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.
- f. Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.



## 2.1.3 Fungsi Anggaran dan Karakteristik Anggaran

### 2.1.3.1 Fungsi Anggaran

Menurut Munandar (2014:10), fungsi anggaran mempunyai kegunaan pokok yaitu:

- a. Sebagai pedoman kerja  
Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang.
- b. Sebagai alat pengkoordinasian kerja  
Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju kesasaran yang telah ditetapkan.
- c. Sebagai alat pengawasan kerja  
Anggaran berfungsi juga sebagai tolak ukur, sebagai alat perbandingan untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan apa yang tertuang didalam anggaran dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapat dinilai apakah telah sukses bekerja atau kurang.  
Dilain pihak menurut Mulyadi (2013:502),  
fungsi anggaran terdiri dari enam *item* yaitu :
  - a. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses rencana kerja
  - b. anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan dimasa yang akan datang.
  - c. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang berhubungan yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer atas dan manajer bawah.
  - d. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.
  - e. Anggaran berfungsi sebagai alat tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya.
  - f. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut standar akuntansi pemerintah (2016:8) paragraf 13 menyebutkan bahwa fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain yaitu:

- a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan public
- b) Anggaran merupakan target fiscal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan
- c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum
- d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah
- e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggung jawaban pemerintah kepada publik.  
Dari pendapat yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran berhubungan erat dengan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

### 2.1.3.2 Karakteristik Anggaran

Mulyadi (2013:490), mengatakan bahwa karakteristik anggaran sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
- c. Anggaran berisi komitmen atas kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan anggaran.
- d. Usulan anggaran yang telah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.
- f. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan .

Menurut Robert dan Vijay (2013;73) anggaran memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- a) Anggaran mengestimasi potensi laba dari unit bisnis tersebut.
- b) Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah nonmoneter.
- c) Biasanya meliputi waktu selama satu tahun
- d) Merupakan komitmen manajemen; manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran
- e) Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran
- f) Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu
- g) Secara berkala, kinerja keuangan actual dibandingkan dengan anggaran, dan varians dianalisis serta dijelaskan.

Menurut Nafarin (2013;11), menegaskan bahwa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

- a) Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan
- b) Data waktu lalu
- c) Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi
- d) Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing
- e) Penelitian untuk pengembangan perusahaan

Menurut Nafarin (2013;11), mengatakan bahwa dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan perilaku para pelaksana anggaran dengan cara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Anggaran harus dibuat serealitas, secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah, tidak menggambarkan kedinamisan, edangkan anggaran yang dibuat terlalu tinggi hanyalah angan-angan

- b) Untuk memotivasi manajer pelaksanaan, diperlukan partisipasi top manajemen (direksi)
- c) Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana tidak merasa tertekan tetapi termotivasi
- d) Untuk membuat laporan realisasi anggaran diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan dapat segera diantisipasi lebih dini.

Nafarin (2013;12), juga menyatakan bahwa anggaran yang dibuat juga akan mengalami kegagalan bila tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pembuatan anggaran yang tidak cakap, tidak mampu berfikir ke depan
- b) Kekuasaan membuat anggaran tidak tegas
- c) Pelaksanaan tidak cakap
- d) Tidak didukung oleh masyarakat
- e) Dana tidak cukup

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menyusun anggaran sangat perlu memperhatikan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran, perilaku para pelaksana dan hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan pada anggaran yang telah dibuat.

#### 2.1.4 Revisi Anggaran

Robert dan Vijay (2013:85) ada dua jenis revisi anggaran yaitu sebagai berikut :

- a. Prosedur yang memungkinkan pemuktahiran anggaran secara sistematis.
- b. Prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu.

Revisi anggaran harus dibatasi keadaan-keadaan dimana anggaran yang disetujui sedemikian tidak realistinya sehingga tidak lagi menjadi alat pengendalian yang berguna. Revisi anggaran harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran yang asli disetujui.

Revisi atau perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau perkiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. alasan perubahan APBD yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
4. Keadaan darurat, dan keadaan luar biasa.

#### 2.1.5 Perencanaan

##### 2.1.5.1 Pengertian Perencanaan

Menurut nafarin (2016:4) menyatakan: “Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya”.

Menurut Safroni (2014:47) perencanaan adalah fungsi dasar manajemen sebelum selanjutnya dilanjutkan dalam tahap pengorganisasian, pengarahan, dan lain-lain.

Darsono dan Purwanti (2014:10) menyatakan bahwa: “Perencanaan merupakan pengambilan keputusan tentang sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, alat kerja dan metode kerja yang digunakan, dan sumber daya manusia yang melakukannya”.

Menurut Nugroho dan Wrihatnolo (2014) yaitu: “Perencanaan dalam arti luas merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian. Perencanaan yang ideal adalah langkah-langkah yang dilakukan manusia agar kepastian semakin dengan kehidupan manusia. Perencanaan dalam arti sempit merupakan *derivate* dari kemampuan *Foresight* yaitu kemampuan mengukur (*measuring*). Inti dari perencanaan ideal adalah mengukur”.

Samodra Wibawa (2014) perencanaan adalah “Proses memilih sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa”.

Menurut Anggarini dan Puranto (2016) adalah “Perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”.

Sistem perencanaan dalam undang-undang mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan meliputi:

- a) Pendekatan politik
- b) Pendekatan teknokratik
- c) Pendekatan partisipatif
- d) Pendekatan top-down
- e) Pendekatan bottom-up

Menurut Olsen dan Eadie dalam permedi (2011), jika ditinjau dari ruang lingkup rencana yang dihasilkan, perencanaan dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

- a) Perencanaan strategi  
Merupakan upaya yang disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan penting membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi dan entitas lainnya. Pemerintah daerah menyelenggarakan perencanaan strategi-strategi antara lain:
  1. Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif
  2. Memperjelas arah masa depan
  3. Menciptakan prioritas

4. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi dimasa depan
  5. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan
  6. Menggunakan keeluasaan maksimum dalam bidang-bidang yang berada di bawah perencanaan.
- b) Perencanaan taktis  
Dikatakan perencanaan taktis apabila rencana yang dihasilkan hanya mengandung uraian tentang kebijakan, tujuan, serta kegiatan jangka pendek saja. Perencanaan taktis mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi dan kondisi.
- c) Perencanaan menyeluruh  
Dikatakan perencanaan menyeluruh apabila yang dihasilkan mengandung uraian yang bersifat menyeluruh, dalam arti mencakup seluruh aspek dan ruang lingkup berbagai kegiatan yang akan dilakukan
- d) Perencanaan terpadu  
Dikatakan perencana terpadu apabila rencana yang dihasilkan jelas menggambarkan keterpaduan antara kegiatan yang akan dilakukan dengan kegiatan yang telah ada.

Melalui beberapa pengertian perencanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan

#### 2.1.5.2 Aspek Perencanaan

Menurut Bhisma. M.,et.al (2013), alam membahas aspek perencanaan, ada tiga aspek pokok yang harus diperhatikan. Ketiga aspek yang dimaksud adalah hasil dari pekerjaan perencanaan (*outcome planning*), perangkat organisasi yang digunakan untuk melakukan pekerjaan perencanaan, serta proses atau langkah-langkah melakukan pekerjaan perencanaan. Adapun uraian aspek ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil dari pekerjaan perencanaan

Hasil dari pekerjaan perencanaan disebut dengan rencana yang dapat berbeda antara satu pekerjaan perencanaan dengan pekerjaan perencanaan lainnya.

b. Perangkat perencanaan

Adalah merupakan satuan organisasi yang ditugaskan dan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pekerjaan perencanaan.

c. Proses perencanaan

Adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada pekerjaan perencanaan.

### 2.1.5.3 Ruang Lingkup Perencanaan

Menurut Olsen dan Eadie dalam permedi (2011), jika ditinjau dari ruang lingkup rencana yang dihasilkan, perencanaan dapat dibedakan empat macam yakni:

a. Perencanaan strategis

Adalah upaya yang disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi dan entitas lainnya;

Pemerintah daerah menyelenggarakan perencanaan strategis bertujuan antara lain adalah;

1. Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif
2. Memperjelas arah masa depan
3. Menciptakan prioritas
4. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi dimasa depan
5. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan
6. Menggunakan keeluasaan maksimum dalam bidang-bidang yang berada di bawah perencanaan

b. Perencanaan Teknis

Disebut perencanaan teknis apabila rencana yang dihasilkan hanya mengandung uraian tentang kebijakan, tujuan, serta kegiatan jangka pendek saja. Perencanaan teknis mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi dan kondisi.

c. Perencanaan Menyeluruh

Disebut perencanaan menyeluruh apabila yang dihasilkan mengandung uraian yang bersifat menyeluruh, dalam arti mencakup seluruh aspek dan ruang lingkup berbagai kegiatan yang akan dilakukan

d. Perencanaan terpadu

Disebut perencanaan terpadu apabila rencana yang dihasilkan jelas menggambarkan keterpaduan antar kegiatan yang akan dilakukan dengan kegiatan yang telah ada.

### 2.1.5.4 Jenis Rencana

Menurut Sofyan (2015:62) Rencana dibagi beberapa jenis:

a. Rencana umum (*strategic plan*)

Merupakan rencana umum organisasi, rencana umum yang ditetapkan pimpinan sebagai arah umum dari organisasi.

b. *Tactical planning*

Merupakan penjabaran dari strategi perusahaan yang sifatnya jangka pendek dan lebih khusus. Disini dilakukan dua tahap kegiatan:

- 1) Formulasi : perumusan strategi
- 2) Implementasi : pelaksanaan strategi

c. *Operational planning*

*Operational planning* dibagi dalam bentuk rencana:

- 1) *Standing plan* berupa kebijaksanaan, standar kerja atau SOP (*Standar operating procedures*)
- 2) *Single use plan* adalah rencana satu waktu dan satu proyek saja.

Rencana ini dibagi dua:

- a) Program
- b) Proyek yaitu penjabaran dari program

Menurut Gitosudarmo (2014:156) sebagai suatu perencanaan, di dalam anggaran terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rencana

Rencana merupakan penentuan lebih dahulu tentang kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang . alasan yang mendorong untuk menyusun rencana antara lain:

- a) Waktu yang akan datang penuh ketidakpastian.
- b) Waktu yang akan datang penuh dengan alternatif.
- c) Rencana sebagai pedoman alat koordinasi dan alat pengawasan.

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan

Kegiatan-kegiatan dalam perusahaan mencakup kegiatan-kegiatan bidang produksi, pemasaran, keuangan, pesonalia, dan administrasi umum.

3. Dinyatakan dalam satuan moneter

Semua aktivitas yang akan dilaksanakan dinyatakan dalam satuan rupiah. Sebelum dinyatakan dalam satuan rupiah, pada setiap aktivitas diukur dengan satuan sendiri-sendiri.

4. Menyangkut waktu yang akan datang

Anggaran disusun dan berlaku untuk periode yang akan datang. Periode anggaran yang digunakan adalah jangka panjang dan jangka pendek. Rencana tahunan perusahaan harus disusun setiap tahun. Rencana bias bersifat jangka panjang, menengah, dan pendek

Beberapa kegunaan anggaran ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Agar setiap orang mengetahui arah yang akan dicapainya
- b. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas yang akan dicapai
- c. Sebagai alat penting dalam melaksanakan pengawasan
- d. Sebagai alat terjemahan filosofi dan tujuan utama perusahaan
- e. Sebagai media untuk menilai prestasi perusahaan dan orang-orangnya baik dalam merumuskan tujuan maupun dalam mencapainya
- f. Dapat meningkatkan perestasi karyawan
- g. Kita dapat lebih *aware* terhadap prestasi yang terbaik.



## 2.1.6 Realisasi Anggaran

### 2.1.6.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2013:71) Laporan Realisasi Anggaran merupakan “ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan secara garis besar, proses penyusunan anggaran terjadi menjadi dua yaitu:

a. Dari atas ke bawah (*top-down*)

Merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada para karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalankan sebuah program. Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah:

1. Perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mempertimbangkan efek pengeluaran tersebut.
2. Metode pembagian semena-mena (*Arbitrary allocation method*) merupakan proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya. Metode ini tidak berdasar pada teori, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak membuat konsep pendistribusian anggaran dengan baik.
3. Metode persentase penjualan (*percentage of sales*) menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan dengan persentase peningkatan penjualan di lapangan. Metode ini mendasarkan pada dua hal, yaitu persentase penjualan dan sejumlah pengembalian yang diterima aktivitas periklanan dan promosi yang dilakukan.
4. Melihat pesaing (*competitive parity*) karena sebenarnya tidak perusahaan yang tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya. Tiap perusahaan akan berusaha untuk melakukan promosi yang lebih baik dari para pesaingnya dengan tujuan untuk menguasai pangsa pasar.
5. Pengembalian investasi (*Return of investment*) merupakan pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya. Sesuai dengan arti katanya, investasi berarti penanaman modal dengan harapan akan adanya pengembalian modal suatu hari.

b. Dari bawah ke atas (*Bottom-up*)

Merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran. Terdapat 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yakni:

- 1) Metode tujuan dan tugas (*Objective and task method*)  
Dengan menegaskan pada penentuan tujuan dan anggaran yang disusun secara beriringan. Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan, penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tugas dan strategi tersebut.
- 2) Metode pengembalian berkala (*Payout planning*)  
Menggunakan prinsip investasi dimana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu. Selama tahun pertama, perusahaan akan mengalami rugi dikarenakan biaya promosi dan iklan masih melebihi keuntungan yang diterima dari hasil penjualan, pada tahun kedua, perusahaan akan titik impas (*Break even point*) antara biaya promosi keuntungan yang diterima. Setelah memasuki tahun ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan. Strategi ini hasilnya akan dirasakan dalam jangka panjang.
- 3) Metode penghitungan kualitatif (*Quantitative models*)  
Menggunakan sistem perhitungan statistik dengan mengolah data yang dimasukkan dalam computer dengan teknis analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Metode ini jarang digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya.

#### 2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2013:71) yaitu;

- a. Tujuan  
Tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi Realisasi dan Anggaran Entitas pelaporan. Perbandingan antara Anggaran dan Realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara Legislatif dan Eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Manfaat  
Informasi ini berguna bagi para pengguna laporan dalam memperbaiki maupun mengetahui informasi laporan Realisasi Anggaran dengan baik dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan Entitas Laporan terhadap Anggaran dengan:
  1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
  2. Menyediakan informasi mengenali realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal Efektivitas penggunaan anggaran.
  3. Akun-akun pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
    - a) Pendapatan
    - b) Belanja
    - c) Transfer
    - d) Surplus atau deficit
    - e) Penerimaan pembiayaan
    - f) Pengeluaran pembiayaan
    - g) Pembiayaan Neto

#### 2.1.7 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

##### 2.1.7.1 Pengertian APBD

Menurut Yani (2013:369), APBD merupakan: “Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

#### 2.1.7.2 Asas Umum APBD

Menurut Yani (2013:369), dalam menyusun terdapat beberapa asas umum yang harus dijadikan pedoman, yaitu sebagai berikut:

- a. APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- b. Penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
- c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
- d. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- e. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.
- f. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- g. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- h. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- j. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
- k. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

### 2.1.7.3 Struktur APBD

Menurut Halim dan Iqbal (2014:85) kebijakan penyusunan anggaran didasarkan pada struktur dari APBD yang terdiri atas:

- a. Pendapatan daerah  
Pendapatan daerah meliputi semua uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, serta merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Belanja daerah  
Belanja daerah mencakup semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- c. Pembiayaan daerah  
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan uang yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### 2.1.8 Efektivitas

Pengertian efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Efektivitas pengelolaan anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan asli dengan target yang ditetapkan dalam APBD (Trianto, 2017:5).

Menurut pendapat Robbins (2016:18) menyatakan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi
2. Produktifitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki
10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan

11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah keterbukaan terhadap rangsangan lingkungan

Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bias mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktifitasnya juga setinggi yang diharapkan. Rumus efektifitas menurut Mahsun (2016:187) adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi anggaran pendapatan}}{\text{Total anggaran pendapatan}} \times 100$$

Kriteria efektivitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian pengelolaan keuangan dalam tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Rasio Efektivitas**

<b>Rasio Efektivitas (%)</b>	<b>Kemampuan keuangan</b>
>100	Sangat efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup efektif
60-80	Kurang efektif
<60	Tidak efektif

Sumber: Mahsun, 2016:187

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran dalam pencapaian target yang telah ditentukan atau suatu perbandingan target dari yang telah direalisasikan. Indikator efektivitas merupakan pengukuran dari kuantitas, kualitas, dan waktu.

#### 2.1.9 Efisiensi

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Murni, 2016:6).

Efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input (Trianto, 2017:5).

Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maximum dengan input tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah akan dikatakan efisien apabila rasio antara 60,01% s/d 80%, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja akan semakin baik dan semakin besar rasio berarti semakin buruk (Yunianti, 2017:3).

Untuk menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan dilihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah ratio antara penerimaan dengan belanja rutin, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan efisien merupakan tingkat pencapaian maximum yang telah ditentukan atau suatu ukuran dalam membandingkan dengan sumber-sumber yang digunakan. Indikator efisien merupakan ukuran terhadap hubungan antara input dengan output untuk suatu waktu tertentu.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan efisiensi di ukur dengan ratio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo 2017:133).

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Indikator efisiensi

menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Dengan demikian efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$efisien = \frac{\text{Realisas anggaran belanja}}{\text{Total anggaran belanja}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Efisiensi**

<b>Presentase Efisiensi</b>	<b>Kemampuan keuangan</b>
Diatas 100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2016)

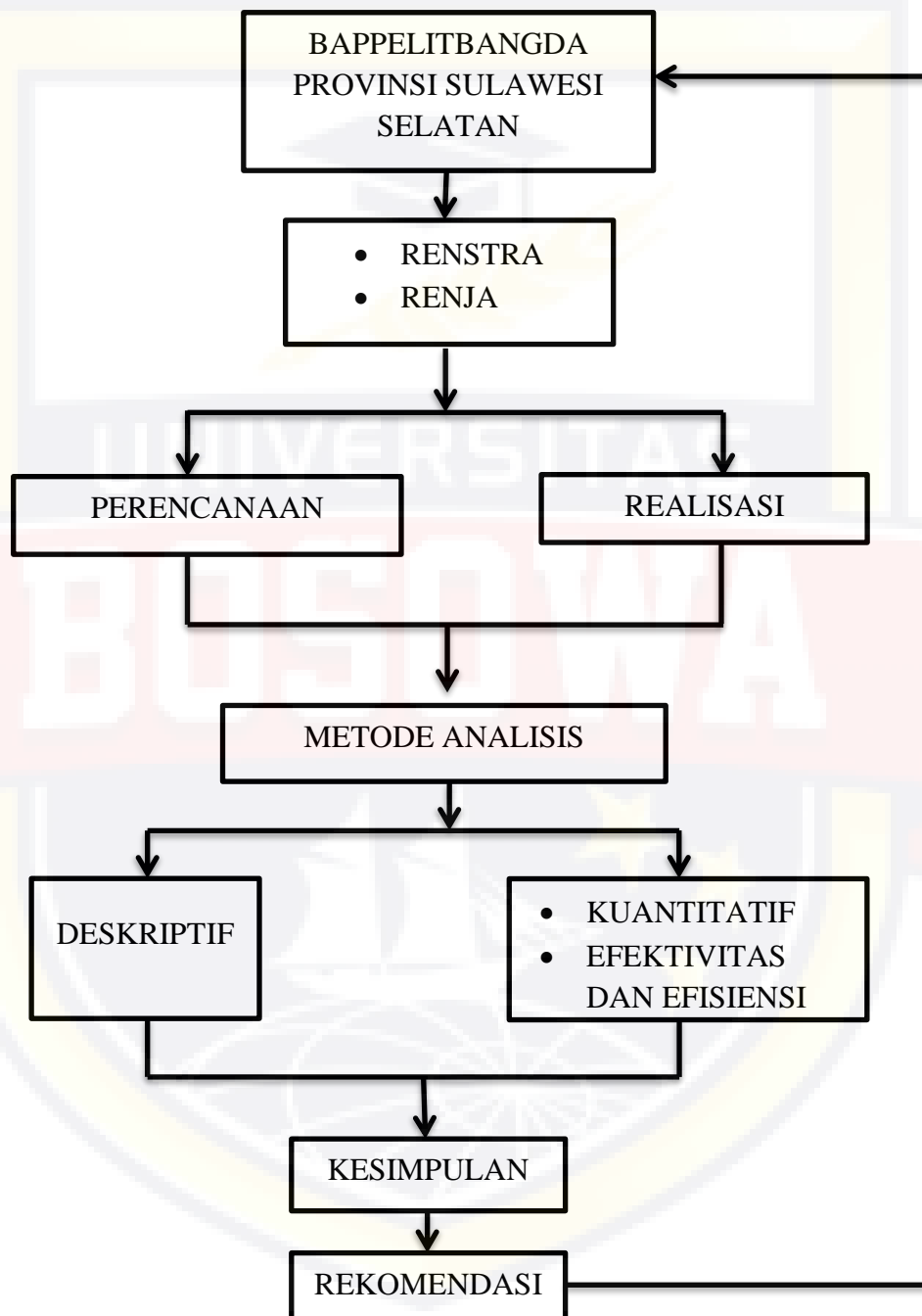
## 2.2 Kerangka pikir

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti yaitu perencanaan anggaran dan realisasi anggaran. Sehingga dalam penelitian ini perlu diuji dan dianalisis apakah benar-benar variabel tersebut mempunyai perbandingan signifikan terhadap anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pada tinjauan pustaka sebelumnya, maka secara skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

## KERANGKA PIKIR





### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan telah dituangkan dalam kerangka pikir, maka dapat ditarik hipotesis dalam penelitian ini yaitu: “Diduga bahwa perencanaan dan realisasi anggaran belum efektif dan efisien pada badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan”.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No.269. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, dari tanggal 01 April sampai 31 Mei 2021.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

1. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk informasi, baik secara lisan maupun tulisan yang dapat digunakan untuk mendukung data lainnya yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka atau data yang disajikan dalam bentuk angka. Sifat data ini adalah runtut waktu yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu.

##### **3.2.2 Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan beberapa pegawai instansi.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen perusahaan/instansi dan laporan-laporan lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang meliputi data yang menyangkut atau berhubungan dengan perencanaan anggaran dan realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, literature perusahaan/instansi serta data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan penulis untuk memperoleh data-data yang akurat dan relevan terkait dengan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 3.3.1 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat data berada, baik dalam penelitian skala kecil maupun besar (Sugiarti dkk,2020:39).

Adapun metode yang digunakan penelitian langsung yaitu meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan. yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data primer atau informasi mengenai keadaan sebenarnya, khususnya perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu, mengadakan tanya jawab secara langsung dengan karyawan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan atau pihak-pihak yang bersangkutan mengenai masalah yang dibahas.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan beberapa informasi yang berupa data tentang perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan.

### 3.3.2 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai pedoman pokok dalam pengumpulan data di lapangan.

Studi Pustaka (*Library Research*), menurut Sugiarti dkk (2020:39) merupakan studi yang dilakukan dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data utamanya, seperti naskah, buku, Koran, majalah, dan lain-lain. Seiring

dengan perkembangan teknologi maka pustaka tidak hanya mengajuh pada dokumen tulis saja, tetapi juga dokumen digital. Semuanya merujuk pada makna yang sama, yaitu dokumen yang ada di dalam internet. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang didapatkan dari membandingkan dan mengkaji beberapa sumber, membaca dan mempelajari buku-buku literatur seperti Anggaran Perusahaan, Penyusunan Anggaran, jurnal-jurnal penelitian, skripsi-skripsi terdahulu, serta referensi lainya yang terkait dengan Perencanaan dan Realisasi Anggaran Dari internet.

#### 3.4 Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Sugiyono (2013:244) adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan dan mengolah data pada Badan Perencanaan pembangunan penelitian dan Pengembangan daerah (BAPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu analisis perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

##### 3.4.1 Analisis Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:132) Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas

merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran pendapatan dengan total anggaran pendapatan (Mahsun:2013)

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi anggaran pendapatan}}{\text{Total anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas pendapatan sebagai berikut:

1. Jika hasil pencapaian lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif
2. Jika hasil pencapaian 100%, maka pendapatan dikatakan efektif
3. Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif
4. Jika hasil pencapaian 75%-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif
5. Jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

### 3.4.2 Analisis Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat publik dapat tercapai manfaat tertentu. *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. *Output* adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik. Efisiensi berarti tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total anggaran belanja (Mahsun:2013)

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{realisasi anggaran belanja}}{\text{Total anggaran belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil pencapaian lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien

5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

### 3.5 Definisi Operasional

Setiap penelitian yang dilakukan, memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, objek yang diteliti harus mempunyai gambaran yang jelas agar tidak melenceng dari koridor penelitian yang akan dilakukan. Adapun batasan definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rencana strategi (RENSTRA) yang merupakan program atau kegiatan yang berlandaskan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi selatan yang hendak dicapai dalam kurung waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga /instansi yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan stratejik.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 1 tahun berdasarkan RKPD tersebut pemerintah daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan.
3. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk



mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut.

4. Efektiv merupakan target dalam batas waktu yang sudah ditetapkan tanpa sama sekali memperdulikan biaya yang sudah dikeluarkan.
5. Efisien merupakan pencapaian target menggunakan input (biaya) yang sama untuk menghasilkan output (hasil) yang lebih besar.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan**

##### **4.1.1 Gambaran Pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan**

Tujuan dibentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan yaitu untuk merencanakan, mengatur, menyesuaikan dan membuat ulasan terhadap semua program dan aktivitas pembangunan yang dilakukan di Daerah. Dalam Keputusan No 27 Tahun 1980 pasal 1 dinyatakan bahwa di Provinsi Daerah Tingkat 1 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Tingkat 1, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 107 Keputusan Menteri Dalam Negeri No 185 Tahun 1980 ditegaskan bahwa dibentuknya organisasi tata kerja Bappelitbangda tingkat 1 menetapkan bahwa peraturan yang berlaku setelah mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut dibentuk Bappelitbangda tingkat 1 Sulawesi Selatan Melalui Perda No. 3 Tahun 1982. Namun seiring dengan pelaksanaan otonomi Daerah, maka Bappelitbangda Sulawesi Selatan mengalami strukturisasi yang dijabarkan dalam perda No. 21 Tahun 2001. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sesuai peraturan daerah tersebut adalah badan yang bertugas membantu Gubernur untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam pemerintahan di lingkup perencanaan pembangunan daerah. Untuk mengalokasikan tugas tersebut Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai beberapa fungsi yaitu membentuk kegiatan pembangunan daerah,

membentuk program pembangunan tahunan daerah dan rancangan koordinasi sekretaris daerah.

Gambaran pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dengan keterlibatannya dalam penyusunan rancangan Strategis tersebut tentu sangat dibutuhkan untuk menguraikan tujuan, fungsi, dan struktur organisasi yang berhubungan dengan fungsi, tujuan serta struktur organisasi yang berkaitan dengan kelembagaan dari Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan, adapun sumberdaya yang dimiliki oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi antara lain yaitu keadaan kepegawaian, serta keadaan sarana dan prasarana yang dipunyai, perwujudan kinerja dan manifestasi dari pelayanan yang terkait dengan kewajiban pokok dan tugas Bappelitbangda provinsi sulawesi selatan, dan juga tantangan serta peluang untuk upaya peningkatan terhadap pelayanan Bappelitbangda provinsi sulawesi selatan. Tugas Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu komponen pemerintah daerah yaitu membantu Gubernur atau kepaladalam melaksanakan dan bertanggungjawab atas perancangan pembangunan daerah.

SDM (sumber daya manusia) merupakan perangkat yang tentunya diperlukan untuk menjalankan kinerja organisasi secara menyeluruh. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yang berkaitan dengan kebutuhannya agar dapat membentuk organisasi yang baik. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan dukungan dari sumber daya birokrasi yang terdistribusi berdasarkan bidang dan kesekretariatan dalam menjalankan tugas pokoknya dan fungsinya, Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan 23 Oktober 2020,

jumlah pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) orang Aparatur Sipil Negara. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yaitu salah satu organisasi pemerintahan daerah yang didirikan berdasarkan peraturan daerah provinsi sulawesi selatan nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi sulawesi selatan nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, yang Kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang tingkatan, susunan instansi, tanggungjawab, tugas dan fungsi, serta aturan kerja badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah provinsi sulawesi selatan. Untuk melaksanakan kinerja pemerintahan secara menyeluruh diperlukan sebuah komponen yang sangat penting yaitu Sumber daya manusia adalah. Agar dapat terciptanya Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang baik, maka perlu merancang kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yang berkaitan dengan kebutuhannya. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh dukungan dari sumber daya birokrasi yang terdistribusi berdasarkan bidang dan kesekretariatan., untuk melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya.

Untuk menjalankan fungsi dan tugas pokoknya Secara umum, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang terus meningkat untuk 5 tahun terakhir, hal tersebut selain menjadi nilai tambah tersendiri untuk Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Apabila tidak dikelola secara baik dapat membuat semakin bertambahnya beban kerja sumber daya manusia yang ada. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan kebijakan pusat (antar kementerian) terkait dengan penyusunan perencanaan, kelitbangdan dan evaluasi daerah
2. perkembangan antara proses penganggaran dan proses perencanaan yang belum konsisten dan belum optimalnya proses politik untuk menterjemahkan dokumen anggaran menjadi dokumen perencanaan.
3. Belum sempurnanya pemakaian hasil kelitbangdan sebagai pertimbangan strategi bagi pemerintah provinsi sulawesi selatan
4. Kurangnya koordinasi antar bidang di lingkup Bappelitbangda.

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 23 oktober 2020 sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) orang Aparatur Sipil Negara.

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan penyusunan dan menjalankan kebijakan daerah dalam urusan perencanaan pembangunan daerah berupa :

- a. Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Pergub Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi/ Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023;
- c. Pergub Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;

- d. Pergub Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. Pergub Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
- f. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2019 dan 2020;
- g. Pergub Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 455/II/2019 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019;
- h. Penyusunan Perencanaan Kesejahteraan Sosial tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah dengan Pangan dan Gizi Tahun 2019-2023;
- i. Penghargaan Anugerah Iptek dan Inovasi (Penyelenggara oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI) pada Tahun 2019
- j. Penghargaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi Berkinerja Utama (Penyelenggara oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI) pada Tahun 2019;
- k. 11. Pelaksanaan Governor Award For Innovation (GAFI) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;
- l. Juara Terbaik II Provinsi Lomba Inovasi Daerah “Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Sektor Pasar Tradisional” (Penyelenggara oleh Kementerian Dalam Negeri RI) Tahun 2020;
- m. Juara Terbaik Provinsi Lomba Inovasi Daerah “Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Sektor Hotel (Penyelenggara oleh

Kementerian Dalam Negeri RI) Tahun 2020;

n. Juara terbaik III Provinsi Lomba Inovasi Daerah “Tatanan normal

Baru Produktif dan Aman Covid-19 Sektor Tempat Wisata (Penyelenggara oleh Kementerian Dalam Negeri RI) Tahun 2020.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan**

##### **4.1.2.1 Visi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan**

“Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah”.

##### **4.1.2.2 Misi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan**

- 1) Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan wilayah yang menjamin sinergitas.
- 2) Meningkatkan kinerja pelaksanaan rencana pembangunan wilayah.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi.
- 4) Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM perencanaan.

#### **4.1.3 Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan**

##### **4.1.3.1 Tugas Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan**

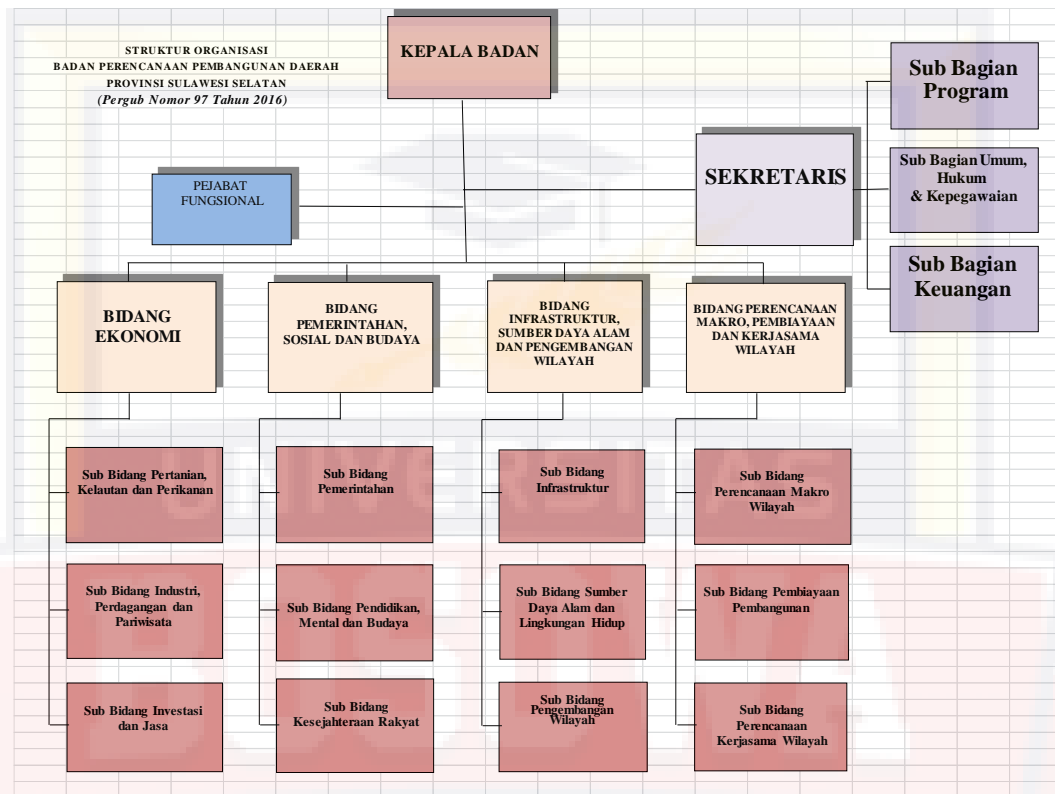
1. Membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab terhadap rancangan pembangunan daerah.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah pada bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### 4.1.3.2 Fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

1. bidang perencanaan penelitian dan pengembangan berfungsi sebagai penunjang dalam menyusun kebijakan teknis
2. bidang perencanaan penelitian dan pengembangan berfungsi sebagai penunjang dalam menjalankan tugas dukungan teknis
3. bidang perencanaan penelitian dan pengembangan berfungsi sebagai penunjang untuk memantau evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
4. bidang perencanaan penelitian dan pengembangan berfungsi sebagai penunjang untuk Pembinaan teknis penyelenggaraan
5. fungsi lainnya yang diberikan Gubernur yang disesuaikan pada pelaksanaan tugas dan fungsinya



#### 4.1.4 Struktur Organisasi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 4.1 struktur organisasi bappelitbangda provinsi Sulawesi selatan

#### 4.1.5 Tugas dan Fungsi Masing-masing bagian

- a) Tugas pokok Kepala badan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai fungsi penunjang pada bidang perencanaan dan penelitian yang dijadikan wewenang oleh daerah.
- b) Sekretariat bertugas untuk, memberikan pelayanan teknis ,mengordinasikan kegiatan serta menyusun program administrasi, pelaporan, kepegawaian, umum, hukum, dan keuangan dalam lingkungan badan. Adapun fungsi sekretariat untuk melaksanakan tugasnya yaitu:
  1. mengkoordinasikan tugas yang dilaksanakan pada lingkup badan

2. mengkoordinasikan program serta pelaporan yang disusun
  3. mengkoordinasikan urusan umum, kepegawaian, dan hukum
  4. mengkoordinasikan administrasi keuangan
  5. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang sesuai bidangnya
- c) Subbag program bertugas mengumpulkan data menyusun dan menyusun perencanaan kegiatan/program dan pelaporan, serta anggaran dinas.
- d) Subbag keuangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Mengumpulkan dan menyusun asset dan kebijakan teknis keuangan
  2. melakukan sistem akuntansi
  3. melakukan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran
  4. melakukan penyusunan neraca asset dan pelayanan perbendaharaan.
- e) Subbag umum,kepegawaian dan hukum memiliki tugas menyelenggarakan urusan umum,surat menyurat,dan kearsipan perlengkapan pengumpulan dan pengolahan data
- f) Bidang perencanaan pengendalian dan pembangunan daerah memiliki tugas untuk menguraikan, mengkoordinasikan, , dan menjalankan kebijakan teknis sebagai fungsi penunjang pada bidang perencanaan pengendalian dan pembangunan daerah. dalam menjalankan tugasnya bidang perencanaan pengendalian dan pembangunan daerah berfungsi untuk:
1. bidang perencanaan pengendalian dan pembangunan daerah berfungsi sebagai penunjang perencanaan dalam merumuskan kebijakan teknis

2. bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk Pelaksanaan strategi teknis
  3. bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk Pelaksanaan pelaporan serta evaluasi.
  4. bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk Pelaksanaan administrasi
  5. melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan bidangnya
- g) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia bertugas untuk mengordinasikan, menguraikan, dan melaksanakan strategi teknis fungsi penunjang perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk Menguraikan strategi teknis
  2. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk melaksanakan kebijakan teknis
  3. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk melaksanakan evaluasi dan pelaporan
  4. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk melaksanakan administrasi
  5. melaksanakan tugas dinaslainnya sesuai dengan bidangnya

h) Bidang perekonomian dan SDA bertugas untuk mengsinkronisasikan, menguraikan, dan menjalankan strategi teknis fungsi penunjang perencanaan bidang perekonomian dan SDA. Untuk menjalankan tugasnya,

bidang perekonomian dan SDA mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. bidang perekonomian dan SDA berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk penguraian kebijakan teknis
2. bidang perekonomian dan SDA berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk melaksanakan kebijakan teknis
3. bidang perekonomian dan SDA berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk melaksanakan evaluasi dan pelaporan
4. bidang perekonomian dan SDA berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk melaksanakan administrasi
5. Menjalankan tugas dinas lainnya sesuai dengan bidangnya

i) Bidang infrastruktur dan kewilayaan bertugas untuk mensinkronisasikan, menguraikan dan menjalankan, strategi kerja fungsi penunjang perencanaan pada bidang infrastruktur dan kewilayaan. Dalam menjalankan tugasnya bidang infrastruktur dan kewilayaan memiliki fungsi:

1. bidang infrastruktur dan kewilayaan berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk penguraian strategi teknis
2. bidang infrastruktur dan kewilayaan berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk melaksanakan strategi teknis

3. bidang infrastruktur dan kewilayaan berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk melaksanakan evaluasi dan pelaporan
  4. bidang infrastruktur dan kewilayaan berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk melaksanakan administrasi
  5. melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan bidangnya
- j) Bidang penelitian dan pengembangan bertugas dalam mensinkronisasikan, merumuskan, dan menjalankan strategi teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugasnya bidang penelitian dan pengembangan memiliki fungsi:
1. bidang penelitian dan pengembangan berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk penguraian strategis teknis
  2. bidang penelitian dan pengembangan berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk melaksanakan kebijakan teknis
  3. bidang penelitian dan pengembangan berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk melaksanakan evaluasi dan pelaporan
  4. bidang penelitian dan pengembangan berfungsi sebagai penunjang perencanaan untuk melaksanakan administrasi
  5. melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan bidangnya
- k) Tugas dan fungsi Bidang inovasi dan teknologi yaitu mendukung kepala bagian penelitian dan pengembangan untuk melakukan persiapan dalam penyusunan strategi kerja penelitian pengembangan dan inovasi daerah lingkup sub bagian inovasi dan teknologi.

## 4.2 Deskripsi Data

Dalam penelitian tersebut penulis menghimpun data pada kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan untuk periode satu tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja untuk periode tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020, untuk kemudian dianalisis guna memahami tingkat efektif dan efisien perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun, Penulis melakukan wawancara terkait Laporan Realisasi anggaran pendapatan Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2018-2019 pada sub bagian keuangan, berikut pemaparannya:

“Sebenarnya untuk LRA pendapatan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan baru ada pada tahun 2020 pada saat Bappeda dan Balitbangda sudah bergabung sebelumnya itu Bappeda tidak ada pendapatan karena bappeda tidak mempunyai objek penerimaan”(ka.sub.keuangan Bappelitbangda Prov.Sulsel).

Informan tersebut menyatakan bahwa pendapatan pada badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) provinsi Sulawesi Selatan dimulai pada tahun 2020 setelah Bappeda dan Balitbangda sudah bergabung menjadi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, dan pada tahun 2018-2019 Bappeda belum memiliki objek penerimaan sehingga tidak ada pendapatan pada tahun 2018-2019.

Penulis juga melakukan wawancara terkait gambaran umum pendapatan Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah

(Bappelitbangda) provinsi sulawesi selatan tiga tahun terakhir (2018-2020) pada sub bagian program, berikut pemaparannya:

”Penerimaan atau pendapatan Bappelitbangda pada tahun 2018-2019 tidak ada, pendapatan Bappelitbangda baru ada satu tahun yaitu tahun 2020 pada saat penggabungan OPD Bappeda dan Balitbangda menjadi OPD Bappelitbangda dan pendapatannya hanya dari sewa aula/mess dan sewa kantin, dan Bappelitbangda tugas pokoknya bukan dipendapatan,tapi di bagian perencanaan anggaran” (ka.sub.bagian program).

Berdasarkan informasi yang disampaikan informan tersebut, penerimaan atau pendapatan Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) provinsi sulawesi selatan pada tahun 2018-2019 tidak ada, pendapatan Bappelitbangda ada pada tahun 2020 setelah OPD Bappeda dan OPD Balitbangda bergabung menjadi OPD Bappelitbangda dan pendapatan pada tahun 2020 berasal dari sewa Aula/mess dan sewa kantin. Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) provinsi sulawesi selatan hanya mempunyai tugas pokok di bagian perencanaan anggaran.

Penulis juga melakukan wawancara terkait dana anggaran belanja badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) provinsi sulawesi selatan, apakah berasal dari anggaran penerimaan/pendapatan, berikut pemaparannya:

“untuk anggaran belanja seluruh OPD lingkup pemprov sulsel itu dari badan pendapatan daerah (Bapenda), tugas pokoknya Bapenda untuk mengumpulkan pendapatan sebanyak-sebanyaknya untuk diserahkan ke Bappelitbangda dan BKAD selaku perencanaan anggaran” (pegawai sub bagian keuangan).

Informan tersebut menyampaikan bahwa dana untuk anggaran belanja seluruh OPD lingkup Pemprov Sulawesi Selatan berasal dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan, dan sudah menjadi tugas pokok Badan pendapatan (Bapenda) Provinsi sulawesi selatan untuk mengumpulkan

pendapatan/penerimaan yang kemudian diserahkan kepada BKAD untuk disalurkan ke berbagai dinas lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan termasuk badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) provinsi sulawesi selatan selaku perencanaan anggaran.

#### **4.2.1 Perencanaan Anggaran**

Setiap Gubernur atau kepala daerah yang terpilih diwajibkan untuk membuat RPJMD enam bulan sekali setelah dilantik yang berlaku untuk 5 tahun sama dengan masa berlakunya Gubernur atau kepala daerah yang disusun bersamaan dengan Renstra untuk perencanaan lima tahun, kemudian dijabarkan dalam bentuk Renja untuk periode 1 tahun yang berpatokan pada Renstra dan RKPD. Setelah disepakati bersama KUA dan PPAS akan dijadikan pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun, memberikan, dan menetapkan RAPBD tahun 2018-2020 oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memperoleh kesepakatan bersama antara KDH dan DPRD mengenai Raperda terhadap APBD, pada tanggal 30 November 2018, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 105 ayat (3c) peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Adapun tahap dalam menyusun APBD sampai RKA adalah sebagai berikut:

1. Pada akhir bulan mei dilakukan penyusunan RKPD
2. Kemudian Pada minggu pertama dalam bulan juni dilakukan penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh ketua TAPD kepada Gubernur
3. selanjutnya pertengahan bulan juni dilakukan penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Gubernur ke DPRD



4. Untuk awal bulan juli dilakukan Kesepakatan antara Gubernur dan DPRD terhadap rancangan KUA dan PPAS
5. Kemudian pada awal bulan agustus dilaksanakan Penerbitan Surat Edaran oleh Gubernur terhadap pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
6. Sehingga pada awal bulan agustus s/d akhir bulan September dilakukan Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Raperda APBD.

#### 4.2.2 Realisasi Anggaran

##### 4.2.2.1 Rasio efektivitas

kriteria tingkat efektivitas pendapatan berdasarkan Kemendagri No.690.900-327 tahun 1996 yaitu:

**Tabel 4.1**  
**Kriteria Tingkat Efektivitas Pendapatan**

<b>Rasio Efektivitas (100%)</b>	<b>Kemampuan Keuangan</b>
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri No.690.900-327 tahun 1996

1. pendapatan dikatakan sangat efektif apabila hasil pencapaian lebih dari 100%,
2. pendapatan dikatakan efektif apabila hasil pencapaian 100%

3. pendapatan dikatakan cukup efektif apabila hasil pencapaian antara 90%-99%
4. pendapatan dikatakan kurang efektif apabila hasil pencapaian 75%-89%
5. pendapatan dikatakan tidak efektif apabila hasil pencapaian dibawah 75%.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Total Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

1. Tahun 2020

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{16,754,400}{24,960,000} \times 100\% = 67,13\%$$

**Tabel 4.2**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2020**

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Kriteria
				Efektif
2020	Pendapatan	24,960,000	16,754,400	67.13%
	Bappelitbangda			
	1.Sewa Aula dan Mess	12,000,000	3,600,000	30%
	2.Sewa Kantin	12,960,000	13,154,400	101.50%

Sumber: Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Berdasarkan hasil dari analisis rasio efektivitas pada kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, anggaran pendapatan pada tahun 2020, untuk sewa Aula dan Mess sebanyak Rp.12,000,000, dan realisasi pendapatan untuk sewa Aula dan Mess sebanyak Rp. 3,600,000, yang kemudian dihasilkan rasio efektivitas sebesar 30% sehingga dikatakan tidak efektif. Dan anggaran

pendapatan untuk sewa kantin sebanyak Rp. 12,960,000 dan realisasi pendapatan untuk sewa kantin sebesar Rp. 13,154,400, yang kemudian dihasilkan rasio efektivitas sebanyak 101.50% sehingga dikatakan sangat efektif.

#### 4.2.2.2 Rasio Efisiensi

Kriteria tingkat efisiensi Anggaran Belanja berdasarkan Kemendagri No 690.900-327 Tahun 1996 yaitu:

**Tabel 4.3**  
**Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja**

Rasio Efisiensi (100%)	Kemampuan Keuangan
>100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kemendagri No 690.900-327 Tahun 1996

1. anggaran belanja tidak efisien apabila pencapaiannya lebih dari 100%,
2. anggaran belanja dikatakan kurang efisien apabila pencapaiannya antara 90%-100%
3. anggaran belanja dikatakan cukup efisien apabila hasil pencapaiannya antara 80%-90%
4. anggaran belanja dikatakan efisien apabila pencapaiannya antara 60%-80%
5. anggaran belanja dikatakan sangat efisien. apabila pencapaiannya dibawah 60%.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Total Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

## 1. Tahun 2018

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{39,025,589,213}{39,710,678,591,25} \times 100\% = 98,27\%$$

## 2. Tahun 2019

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{45,203,423,956,00}{48,309,566,774.00} \times 100\% = 93,57\%$$

## 3. Tahun 2020

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{62,419,289,073,00}{67,291,548,453,00} \times 100\% = 92\%$$

**Tabel 4.4**  
**Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018-2020**

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Kriteria Efisien
2018	<b>Belanja Daerah</b>	<b>39,710,678,591.25</b>	<b>39,025,589,213</b>	<b>98,27%</b>
	1. Belanja Tidak Langsung	20,073,564,821	19,707,853,087	98,18%
	2. Belanja Langsung	19,637,113,770	19,317,736,126	98,37%
2019	<b>Belanja Daerah</b>	<b>48,309,588,774.00</b>	<b>45,203,423,956</b>	<b>93,57%</b>
	1. Belanja Tidak Langsung	21,309,588,774.00	21,002,585,878	99,81%
	2. Belanja Langsung	27,266,076,000	24,200,838,078	88,76%
2020	<b>Belanja Daerah</b>	<b>67,291,548,453,00</b>	<b>62,419,289,073,00</b>	<b>92,76%</b>
	1. Belanja tidak langsung	31,549,864,363,00	29,990,310,634,00	95,06%
	2. Belanja Langsung	35,741,684,090,00	32,428,978,439.00	90,73%

Sumber: Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020

Berdasarkan hasil dari analisis rasio efisiensi Kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2018, sebesar Rp.20,073,564,821.25 dan realisasinya sebesar Rp.19,707,853,087, yang kemudian dihasilkan rasio efisiensi sebesar 98,18% sehingga dikatakan kurang efisien. Untuk anggaran belanja langsung sebanyak Rp.19,637,113,770 dan Realisasinya sebesar Rp. 19,317,736,126, yang kemudian dihasilkan rasio efisiensi sebesar 98,37% sehingga dikatakan kurang efisien. Hasil dari rasio efisiensi kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan anggaran belanja tidak langsung tahun 2019, sebesar Rp. 21,043,512,774.00 dan Realisasinya sebesar Rp 21,002,585,878, yang kemudian dihasilkan rasio efisiensi sebesar 99,81% sehingga dikatakan kurang efisien. untuk belanja langsung sebanyak Rp 27,266,076,000 dan realisasinya sebesar Rp 24,200,838,078, yang kemudian dihasilkan rasio efisiensi sebesar 88,76% sehingga dikatakan cukup efisien. Hasil dari rasio efisiensi Kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan anggaran belanja tidak langsung tahun 2020 sebanyak Rp 31,549,864,363,00 dan realisasinya sebanyak Rp 29,900,310,634,00, yang kemudian dihasilkan rasio efisiensi sebesar 95,06% sehingga dikatakan kurang efisien. untuk belanja langsung sebanyak 35,741,684,090,00 dan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 32,428,978,439,00, yang kemudian dihasilkan rasio efisiensi sebesar 90,73% sehingga dikatakan cukup efisien.

#### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan pengamatan langsung, wawancara, dan dokeman pada badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (bappelitbangda)

provinsi sulawesi selatan, pendapatan/penerimaan pada tahun 2018-2019 belum ada karena Bappeda tidak memiliki objek penerimaan dan berdasarkan informasi yang diterima dari beberapa informan menyatakan tentang pendapatan badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) provinsi sulawesi selatan dimulai pada tahun 2020 setelah OPD Bappeda dan OPD Balitbangda bergabung menjadi OPD Bappelitbangda provinsi sulawesi selatan, dan untuk pendapatan pada tahun 2020 berasal dari sewa Aula/mess dan sewa kantin, dan berdasarkan informasi yang diperoleh terkait dana untuk anggaran belanja badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) provinsi sulawesi selatan berasal dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi sulawesi selatan yang kemudian diserahkan kepada BKAD untuk disalurkan ke berbagai dinas lainnya termasuk Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) Provinsi sulawesi selatan selaku perencana anggaran.

Berdasarkan hasil dari analisis rasio efektivitas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan anggaran pendapatan tahun 2020 sebanyak Rp.24,960,000 dan Realisasinya sebanyak Rp.16,754,400, yang kemudian dihasilkan rasio efektivitas sebesar 67,13% sehingga dikatakan tidak efektif yang berdasarkan kriteria efektivitas pendapatan dalam Kemendagri No. 690.900-327 tahun 1996, dimana pendapatan dikatakan tidak efektif apabila pencapaiannya dibawah 75%.

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi anggaran belanja daerah tahun 2018 sebanyak Rp. 39,710,678,591.27 dan realisasi belanja sebesar Rp

39,025,589,213, yang kemudian dihasilkan rasio efisiensi sebesar 98,27% sehingga dikatakan kurang efisien yang berdasarkan kriteria efisiensi anggaran belanjadalam Kemendagri No. 690.900-327 tahun 1996, dimana belanja dikatakan kurang efisien apabila pencapaiannya antara 90%-100%. Hasil rasio efisiensi tahun 2019 Anggaran belanja daerah sebanyak Rp 48,309,588,774.00 dan Realisasi belanja sebanyak Rp 45,203,423,956, yang kemudian dihasilkan rasio efisiensi sebesar 93,57% sehingga dikatakan kurang efisien, yang berdasarkan kriteria efisiensi anggaran belanja dalam Kemendagri No. 690.900-327 tahun 1996, dimana belanja dikatakan kurang efisien apabila pencapaiannya 90%-100%. pada tahun 2020 belanja daerah sebanyak Rp 67,291,548,453,00 dan Realisasi belanja sebanyak Rp 62,419,289,073,00, yang kemudian dihasilkan rasio efisiensi sebesar 92,76% sehingga dikatakan kurang efisien, dimana berdasarkan kriteria efisiensi anggaran belanja dalam Kemendagri No. 690.900-327 tahun 1996, dimana belanja dikatakan kurang efisien apabila pencapaiannya antara 90%-100%.

Anggaran Pendapatan pada badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (bappelitbangda) provinsi sulawesi selatan anggaran tahun 2020, berdasarkan hasil analisis efektivitas dikategorikan tidak efektif sedangkan hasil efisiensi Anggaran belanja pada badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (bappelitbangda) provinsi sulawesi selatan, anggaran pada tahun 2018-2020 dikatakan kurang efisien sebab pengeluarannya lebih banyak dibandingkan pendapatannya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (bappelitbangda) provinsi sulawesi selatan berdsararkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas pada kantor Bappelitbangda provinsi sulawesi selatan tahun 2020 pada hasil analisis Rasio Efektivitasnya dihasilkan 67,13% sehingga dikatakan tidak efektif jika dilihat dari kriterianya .Hal ini berarti pemerintah badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (bappelitbangda) provinsi sulawesi selatan dikatakan belum berhasil merealisasikan pendapatan dengan anggaran pendapatannya pada tahun 2020, sedangkan efisiensi pada kantor Bappelitbangda provinsi sulawesi selatan untuk anggaran pada tahun 2018-2020. Berdasarkan hasil analisis Rasio Efisiensi dihasilkan antara 90%-100%, sehingga masuk pada kriteria kurang efisien, karena pengeluaran lebih banyak dibandingkan pendaptannya, sehingga kantor bappelitbangda provinsi sulawesi selatan dikatakan kurang berhasil dalam merealisasikan anggaran belanjanya.



## 5.2 Saran

1. Dalam menyusun maupun merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja sebaiknya Bappelitbangda provinsi sulawesi selatan harus memperhatikan rasio-rasio keuangan sehingga bisa menambah pendapatan daerah, pembangunan daerah, maupun pelayan publik untuk periode berikutnya.
2. Untuk mencapai tujuan pembangunan secara maksimal dan merencanakan anggaran sebaiknya Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperhitungkan efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran yang akan digunakan.
3. Bappelitbangda Provinsi sulawesi selatan sebaiknya melakukan evaluasi program atau kegiatan yang belum dilakukan setiap 2 bulan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sehingga realisasi bisa tercapai sesuai dengan targetnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, Gunawan. 2014. *Anggaran Perusahaan. Buku 1. BPFE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta*
- Anggarini, Y dan puranto, B.H. 2016. *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Khomprehensif. UPP STIM YKPN. Yogyakarta*
- Basariyah siti. 2017. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017 hlm 63-74. ISSN: 2302-2019.*  
<https://www.google.com/search?client=firefox-d&q=jurnal+analisis+efektifitas+dan+efisiensi+pelaksanaan+anggaran+belanja+pada+badan+pemberdayaan+masyarakat+dan+pemerintahan+desa+>. Diakses tanggal 15 Maret 2021.
- Bhisma, M.et.al. 2013. *perencanaan dan penganggaran untuk investasi kesehatan ditingkat kabupaten dan kota. gadja mada press university. Yogyakarta*
- Basri Ramlah. 2013. *Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Bpm-Pd Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA. Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 202-212. ISSN 2303-1174.*[https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-d&sxsrif=ALeKk00qRZqBZ0N9H3jkmkzL\\_HQ7pmmOKw%3A1615812101138&ei=BVZPYMyCCOTD3LUPx\\_WOAO&q](https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-d&sxsrif=ALeKk00qRZqBZ0N9H3jkmkzL_HQ7pmmOKw%3A1615812101138&ei=BVZPYMyCCOTD3LUPx_WOAO&q). Diakses tanggal 15 Maret 2021.
- Dien A. N. J.dkk .2015. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Jurnal EMBA. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 534-541. ISSN 2303-1174.*[https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&sxsrif=ALeKk023qVbJ62OKnYoWYXxh3yBuyohsAg%3A1615813193031&ei=SVpPYMSvAdbD3LUP\\_LyKgAo&q](https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&sxsrif=ALeKk023qVbJ62OKnYoWYXxh3yBuyohsAg%3A1615813193031&ei=SVpPYMSvAdbD3LUP_LyKgAo&q). Diakses tanggal 15 Maret 2021.
- Gitosudarmo, Indriyo. 2014. *manajemen pemasaran. edisi ke 2 cetakan ke 3. BPFE. Yogyakarta*
- Honga A. F. dan ventje I. 2014. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA. Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal. 278-288. ISSN 2303-1174.*<https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&sxsrif=ALeKk01PMJo9lsPjtfV1eYDQccaZ8gJsg%3A1615813776817&ei=kFxPYOezMcPc9QPk7LioBQ&q>. Diakses tanggal 15 Maret 2021.
- Halim Abdul, Muhamad Iqbal. 2014. *Pengelolaan Keuangan Negara. Penerbit Bulak Sumur. NPP STIM YKPN*
- Jauhari (2017) *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Wilayah Pembayaran Kppn Bandung I dan Kppn Bandung II. Artikel jurnal. Bandung: Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.*  
<https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b->

- [d&sxsrf=ALeKk02sJl8RaWrqWbYxD63\\_B2aeq5IVqw%3A1615814275074&ei=g15PYK\\_eA9CvyAOw85bIBQ&q](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7612). Diakses tanggal 15 Maret 2021.
- Korompot R. dan Agus T. P. 2015. **Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014**. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.841-848. ISSN 2303-1174.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7612>.  
Diakses tanggal 16 Maret 2021.
- Mahsun, 2013. **Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, dan Tekniknya**. Raja grafindo persada. Jakarta
- Munandar, M. 2014. **Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja**. BPFE. Yogyakarta
- Mulyadi, 2013. **Akuntansi Manajemen** .Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta
- Nafarin, M. 2013. **Penganggaran Perusahaan**. Salemba Empat. Jakarta
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2013. **Akuntansi Pemerintahan**, Salemba Empat, Jakarta
- Nugroho, R. dan Randy R. Wrihatnolo, 2014, **Manajemen Perencanaan Pembangunan**, PT. elex media kompulindo gramedia.  
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun **Tentang Klasifikasi Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pembiayaan Daerah**.  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Laporan Realisasi Permendagri No. 56 Tahun 2007 **Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**.  
Peraturan pemerintah no. 71 tahun 2016 **tentang standar akuntansi pemerintah**
- Pangkey M. Dan Sherly P. 2015. **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara**. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 33-43. ISSN 2303-1174.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10581>.  
Diakses tanggal 16 Maret 2021.
- Palilingan A. F. dkk. 2015. **Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado**. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 17-25. ISSN 2303-1174.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6558/0>.  
Diakses tanggal 16 Maret 2021.
- Paramedy. 2011. **Analisis Penyusunan dan Penetapan Anggaran APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tahun 2011**. tesis diterbitkan UNHAS. Makassar.  
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/profitability/article/view/3046>.  
Diakses tanggal 16 Maret 2021.

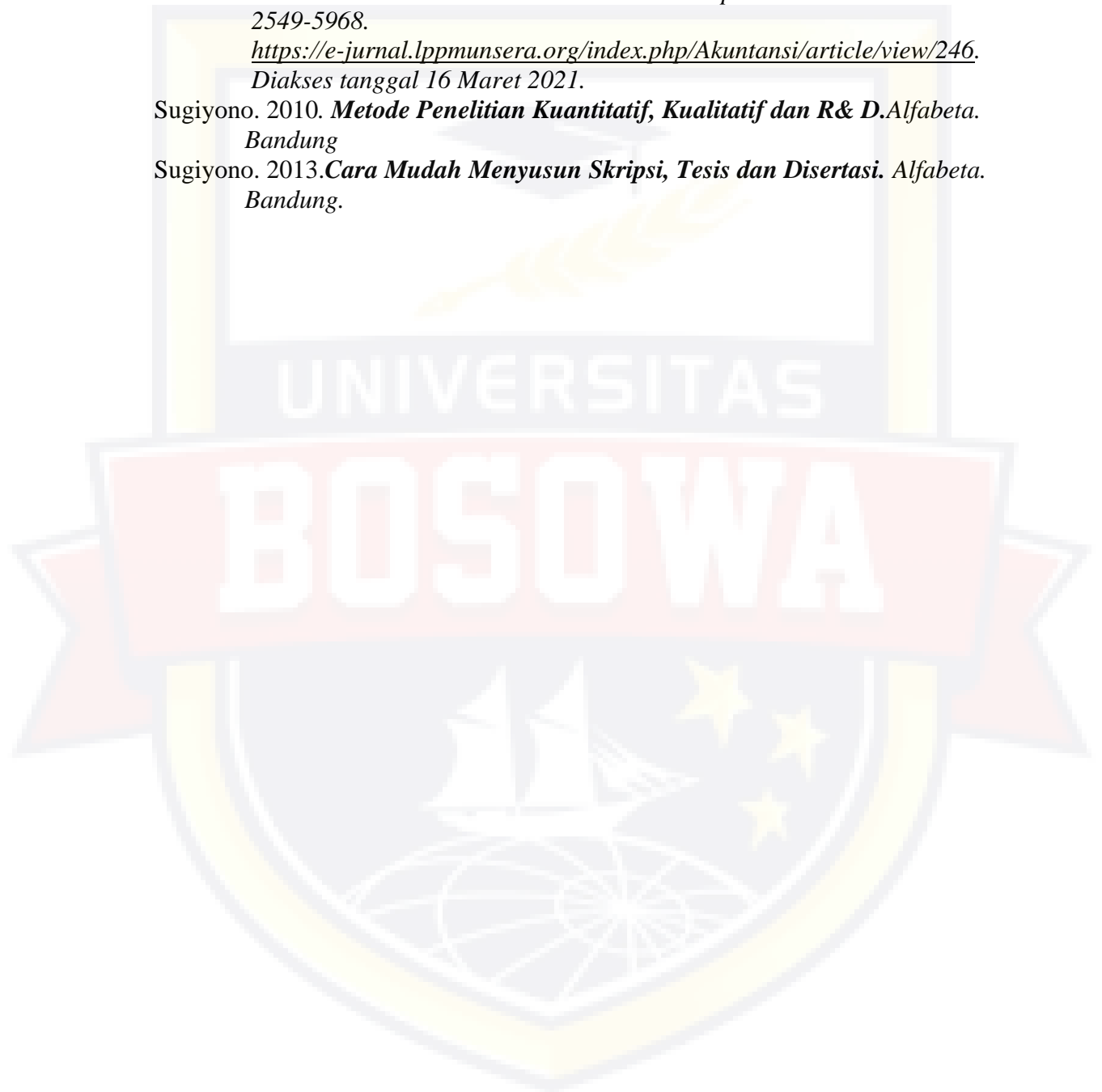
Rukayah dkk. 2017. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. Jurnal Akuntansi. Vol 4 No. 2 Juli 2017. p-ISSN 2339-2436. e-ISSN 2549-5968.*

<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/246>.

Diakses tanggal 16 Maret 2021.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D.* Alfabeta. Bandung

Sugiyono. 2013. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi.* Alfabeta. Bandung.



L

A

M

P

I


R

A

N



## Lampiran 1: Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2020



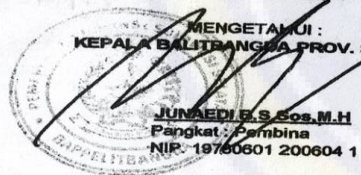
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
 Jln. Urip Sumohardjo No. 269, Telp. (0411) 453486 Fax . (0411) 452816  
 Makassar 90231

---

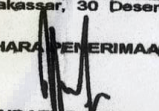
DAFTAR TAHUN ANGGARAN : LAPORAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH  
 BULAN : 2020  
 UNIT KERJA : DESEMBER  
 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO.	JENIS REQUIKARCIS/ BENDA - BENDA BERTHARGA	REALISASI				Persentase ( % )
		TARGET	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
1	04.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah					
	- Sewa Aula dan Mess	Rp 12,000,000	Rp 3,200,000	Rp 400,000	Rp 3,600,000	30.00
	- Sewa Kantin	Rp 12,960,000	Rp 12,074,400	Rp 1,090,000	Rp 13,154,400	101.50
	<b>Jumlah</b>	Rp 24,960,000	Rp 15,274,400	Rp 1,490,000	Rp 16,754,400	67.13

Makassar, 30 Desember 2020

MENGETAUI :  
 KEPALA BALITRANGKA PROV. SULSEL  
  
**JUNARDI B.S. Sos, M.H**  
 Pangkat : Pembina  
 NIP. 19760601 200604 1 017

Telah Diverifikasi / Telah diteliti  
 Oleh Paraf  
 1 Joharia Masuku, SE  
 19751227 200003 2 003  
 2 Hartawan Hasan, SE  
 19750201 201101 1 003

BENDAHARA PENERIMAAN  
  
**TAKUDAENG S. Sos**  
 Pangkat : Penata Tk. I  
 NIP. 19690601 199103 2 009

## Lampiran 2: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN													LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN ( SPJ BELANJA - ADMINISTRASI )	
S K P D : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														
Pengguna Anggaran : Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si														
Bendahara Pengeluaran : JOHARIA MASUKU, SE														
Tahun Anggaran : 2018														
Bulan : Desember														
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	Sisa Pagu Anggaran	
			s/d Bulan lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini			
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3+13)	
3.01	<b>BELANJA DAERAH</b>	39,710,678,591.25	17,522,918,314	2,184,934,773	19,707,853,087	2,844,074,000	2,111,762,200	4,955,836,200	11,916,265,439	2,445,634,487	14,361,899,926	39,025,589,213	685,089,378	
3.01.01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	20,073,564,821.25	17,522,918,314	2,184,934,773	19,707,853,087	-	-	-	-	-	-	19,707,853,087	365,711,734	
3.01.01.00	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	20,073,564,821.25	17,522,918,314	2,184,934,773	19,707,853,087	-	-	-	-	-	-	19,707,853,087	365,711,734	
3.01.01.00.00	Gaji dan Tunjangan	9,011,983,072.25	8,261,278,528	649,486,202	8,910,764,730	-	-	-	-	-	-	8,910,764,730	101,218,341	
3.01.01.00.00.01	Gaji Pokok/Uang Representasi 1)	7,071,748,725.00	6,484,920,400	506,471,200	6,991,391,600	-	-	-	-	-	-	6,991,391,600	80,357,125	
3.01.01.00.00.01.01	Tunjangan Keluarga	659,593,636.75	606,026,918	47,950,612	653,977,530	-	-	-	-	-	-	653,977,530	5,616,106	
3.01.01.00.00.01.01.01	Tunjangan Jabatan 1)	243,680,000.00	226,030,000	17,650,000	243,680,000	-	-	-	-	-	-	243,680,000	-	
3.01.01.00.00.01.01.01.04	Tunjangan Fungsional	390,000,000.00	358,600,000	29,500,000	388,100,000	-	-	-	-	-	-	388,100,000	1,900,000	
3.01.01.00.00.01.01.01.05	Tunjangan Umum	258,210,000.00	237,905,000	17,530,000	255,435,000	-	-	-	-	-	-	255,435,000	2,775,000	
3.01.01.00.00.01.01.01.06	Tunjangan Beras	357,193,545.00	323,934,680	29,257,680	353,192,340	-	-	-	-	-	-	353,192,340	4,001,205	
3.01.01.00.00.01.01.01.07	Tunjangan PPh/1 tunjangan Khusus	31,460,602.75	23,773,459	1,119,823	24,893,082	-	-	-	-	-	-	24,893,082	6,567,520	
3.01.01.00.00.01.01.01.08	Pembulatan Gaji	96,562.75	88,091	7,087	95,178	-	-	-	-	-	-	95,178	1,384	
3.01.01.00.00.01.01.02	Tambahan Penghasilan PNS	11,061,581,749	9,261,639,786	1,535,448,571	10,797,088,357	-	-	-	-	-	-	10,797,088,357	264,493,378	
3.01.01.00.00.01.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	11,061,581,749	9,261,639,786	1,535,448,571	10,797,088,357	-	-	-	-	-	-	10,797,088,357	264,493,378	
3.01.01.00.00.01.02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	19,637,113,770	-	-	-	2,844,074,000	2,111,762,200	4,955,836,200	11,916,265,439	2,445,634,487	14,361,899,926	19,317,736,126	319,377,644	
3.01.01.00.00.01.03	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	16,562,363,200	-	-	-	837,465,000	1,153,192,800	1,990,657,800	11,916,265,439	2,382,463,787	14,298,729,226	16,289,387,026	272,976,174	
3.01.01.00.00.01.04	<b>BELANJA MODAL</b>	3,074,750,570	-	-	-	2,006,609,000	958,569,400	2,965,178,400	-	-	-	2,965,178,400	42,390,618	
3.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	5,752,208,630	-	-	-	2,175,734,000	1,048,547,200	3,224,281,200	1,939,716,565	466,435,400	2,406,151,965	5,630,433,165	121,775,465	
3.01.01.01	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	88,200	-	-	-	-	-	-	88,200	-	88,200	88,200	-	
3.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88,200	-	-	-	-	-	-	88,200	-	88,200	88,200	-	
3.01.01.01.001.01	Belanja Perangko, dan Benda Pos lainnya	88,200	-	-	-	-	-	-	88,200	-	88,200	88,200	-	
3.01.01.01.002	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	122,600,000	-	-	-	-	-	-	98,736,500	19,685,000	118,421,500	118,421,500	4,178,500	
3.01.01.01.002.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	122,600,000	-	-	-	-	-	-	98,736,500	19,685,000	118,421,500	118,421,500	4,178,500	
3.01.01.01.002.01.03	Belanja Telepon	5,000,000	-	-	-	-	-	-	1,498,500	535,000	2,033,500	2,033,500	2,966,500	
3.01.01.01.002.01.03.05	Belanja Kawat/Faximili/Internet	117,600,000	-	-	-	-	-	-	97,238,000	19,150,000	116,388,000	116,388,000	1,212,000	
3.01.01.01.003	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	33,000,000	-	-	-	-	-	-	18,990,000	13,730,000	32,720,000	32,720,000	280,000	
3.01.01.01.003.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,000,000	-	-	-	-	-	-	18,990,000	13,730,000	32,720,000	32,720,000	280,000	
3.01.01.01.003.01.20	Belanja Pemeliharaan Komputer	33,000,000	-	-	-	-	-	-	18,990,000	13,730,000	32,720,000	32,720,000	280,000	





### Lampiran 4: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020

#### LAPORAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN BAPPELITBANGDA PROV. SULSEL TAHUN ANGGARAN 2020

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)	
					Fisik	Keu
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7
	BELANJA DAERAH	67.291.548.453,00	62.419.289.073,00	4.872.259.380,00	98,56	92,76
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	31.549.864.363,00	29.990.310.634,00	1.559.553.729,00	97,13	95,06
II	BELANJA LANGSUNG	35.741.684.090,00	32.428.978.439,00	3.312.705.651,00	100,00	90,73
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (PRIORITAS)	8.779.439.223	8.639.264.451	140.174.772	100,00	98,40
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU (PRIORITAS)	1.505.175.271	916.431.659	588.743.612	100,00	60,89
3	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	970.469.705	925.007.597	45.462.108	100,00	95,32
4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN	2.271.236.112	2.124.084.112	147.152.000	100,00	93,52
5	PROGRAM PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM	349.649.729	229.762.130	119.887.599	100,00	65,71
6	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	5.562.650.000	5.432.912.800	129.737.200	100,00	97,67
7	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.918.673.908	7.591.636.123	327.037.785	100,00	95,87
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.329.913.700	2.850.925.152	478.988.548	100,00	85,62
9	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	931.702.000	885.307.339	46.394.661	100,00	95,02
10	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	356.226.000	183.492.900	172.733.100	100,00	51,51
11	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAHAN (PRIORITAS)	871.730.142	633.621.211	238.108.931	100,00	72,69
12	PROGRAM KELITBANGAN DAN PEMANFAATAN IPTEK DAERAH	2.894.818.300	2.016.532.965	878.285.335	100,00	69,66



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 12839/S.01/PTSP/2021  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan  
 Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Bosowa Makassar Nomor  
 : A.367/FEB/UNIBOS/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **DESRI PAKAN**  
 Nomor Pokok : 4517011002  
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. Unip Sumoharjo Km. 4, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan  
 judul :

**" ANALISIS PERENCANAAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 (APBD) PROVINSI SULAWESI SELATAN "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 April s/d 31 Mei 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan  
 ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan  
**barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 30 Maret 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth  
 1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Bosowa Makassar di Makassar;  
 2. Peringgal.

SIMAP PTSP 30-03-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH**  
**( BAPPELITBANGDA )**

Jl. Urip Sumohardjo No 269 Tlp. 453863 - Makassar 90231

**Nota Dinas**

Kepada Yth : Mahasiswa(i) Unibos Makassar  
 Dari : Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan  
 Tanggal : 07 April 2021  
 Nomor : 010 / 1756 / Bappelitbangda  
 Perihal : Persetujuan Penelitian  
 Tembusan : Kepala Bappelitbangda, Sekretaris & Kepala Bidang Bappelitbangda

**ISI**

Menindak lanjuti Surat Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelatanaan Perizinan, Nomor : 12807/S.01/PTSP/2021, Perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan Judul: "ANALISIS PERENCANAAN DAN REALISASI ANGGARAH PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI SULAWESI SELATAN", Sehubungan dengan hal diatas, dimohon kepada yang berhubungan dengan hal tersebut kesediaanya untuk difasilitasi dalam bentuk Data, Referensi & Informasi, mulai tanggal 01 April 2021 s/d 31 Mei 2021, mahasiswa(i) / peneliti dibawah ini:

Nama : Desri Pakan  
 Nomor Pokok : 4517011002  
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
 Pekerjaan/lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04 Makassar

Demikian Nota Dinas ini disampaikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

An. Kepala Bappelitbangda,  
 Ka. Sub. Bag. Umum, Kepegawaian & Hukum  
 Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan



*(Signature)*  
 Ekran Mallarangang, SE., M.Si  
 Pangkat : Penata  
 Nip. 19861014 201001 1 010

Tembusan Yth :

1. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel
2. Sekretaris dan Kepala Bidang Bappelitbangda Prov. Sulsel
3. Peninggal.

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASME**  
NOMOR : A. /FEB/UNIBOS/VI/ 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: Desri Pakan
Stambuk	: 4517011002
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi Dan Bisnis / Ekonomi Pembangunan

Dinyatakan bebas dari Plagiasme dengan batas maksimal 30 % yang berhubungan skripsi dengan judul:  
**" Analisis Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Makassar, 8 Juli 2021



Dr. H. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si., M.H.  
NIDN . 09 07077003

**FORMULIR PENGAJUAN PENERBITAN**

Nama Lengkap : Desri Pakan  
Stambuk : 4517011002  
Alamat : Jl. Biring Romang Ukip No 40  
Telpon/HP : 085144385939  
E-mail : desripakan0212@gmail.com.

Judul Skripsi :

**" Analisis Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan"**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benar bahwa:

1. Naskah yang diserahkan adalah karya asli dan bebas dari fabrikasi, plagiasi, duplikasi dan pelanggaran hak cipta data/isi.
2. Naskah belum pernah diterbitkan dan tidak sedang dipertimbangkan oleh penerbit lain
3. Apabila dikemudian hari ada implikasi terhadap hal-hal yang disebutkan di atas, bukan menjadi tanggung jawab Penerbit dan Dewan Editor.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan jujur dan bertanggung jawab,

Makassar, 8 Juli 2021







